



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
INSPEKTORAT

Jln. Soekarno Hatta N0.01 (Eks.Pendopo Lama) Kecamatan Raba
Kota Bima Kode Pos 84116, email:sekretariat.itkabbima@gmail.com

PERNYATAAN TELAH DI REVIU
LKjIP PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama. : Iwan Setiawan, SE.
NIP : 197002171999021001
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Inspektur Kabupaten bima
Unit Kerja : Inspektorat Kabupaten Bima

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tim Reviu Inspektorat Kabupaten Bima telah melakukan reviu atas Format, Mekanisme Penyusunan dan Substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima Tahun 2025.

Berdasarkan hasil reviu, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam keandalan data informasi yang disajikan di dalam LKjIP 2025.

Bima, 29 Mei 2026

Inspektur,

Iwan Setiawan, SE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197002171999021001





**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA
INSPEKTORAT**

LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA



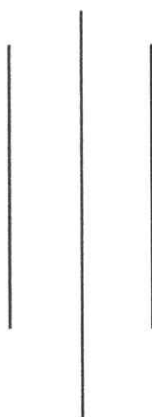
**NOMOR : LHE/SAKIP/35/2026
TANGGAL : 9 APRIL 2026**



PEMERINTAHAN KABUPATEN BIMA
INSPEKTORAT

Jln. Soekarno-Hatta No.1 (Eks Pendopo Lama) Raba - Bima
Kode Pos (84113) email: sekretariat.itkabbima@gmail.com

**LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP
TAHUN 2025**



PADA

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

NOMOR : LHE/SAKIP/35/2026

TANGGAL : 9 APRIL 2026

BAB I

PENDAHULUAN

I. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bima Nomor: 000.8.6.3/077/03.7/2026 tanggal 31 Maret 2026 Hal : Permohonan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025;
5. Surat Perintah Kerja Lembur Inspektur Kabupaten Bima Nomor 700/11/LBR/05/2026 tanggal 6 April 2026 Perihal Untuk Melaksanakan Evaluasi SAKIP Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bima.

II. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. maka perlu dilakukan Evaluasi AKIP atau Evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

III. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan Evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan Evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi, unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.

Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah untuk :

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

IV. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi SAKIP mencakup, antara lain :

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras dengan tujuan

- yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
 5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

V. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

VI. Teknis Evaluasi

Teknik Evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini adalah :

1. Checklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri. Checklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada perangkat Daerah (PD).

VII. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Bima telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Memastikan sasaran dan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan telah selaras dari perencanaan jangka menengah (5 Tahunan) hingga perencanaan jangka pendek tahunan.	Saat ini sedang diselaraskan RPJMD 2025-2029 yang sekaligus di selaraskan dengan RENSTRA OPD 2025-2029 dan Kinerja OPD 2026
2.	Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (OUTCOME) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup	Dalam asistensi oleh BAPPEDA indikator sudah menggunakan indikator SMART

3.	Melakukan reviu dan penyempurnaan pohon kinerja	Sudah dilakukan evaluasi tetapi belum digunakan perbaikan kinerja tahunan berikutnya
4.	Menggunakan indikator kinerja utama dengan definisi operasional	Indikator kinerja utama akan dilengkapi didalam pengukuran melalui mekanisme evaluasi oleh Pimpinan Daerah (RAKOR)
5.	Melakukan pengukuran kinerja secara berkala	Sedang dilakukan perencanaan pengukuran secara berkala pada masing-masing perangkat daerah
6.	Melakukan Pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi	Belum dapat dilakukan karena belum memiliki aplikasi
7.	Memperbaiki Pelaporan Kinerja berdasarkan Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014	Akan dilengkapi
8.	Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya	Sudah dilakukan evaluasi tetapi belum digunakan untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya
9.	Menyusun pedoman pelaksanaan akuntabilitas kinerja internal sesuai Permen PAN RB No. 88 Tahun 2021	Sedang dilakukan penyusunan

10.	Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang cukup guna meningkatkan kualitas implementasi AKIP di setiap perangkat Daerah	Sedang dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rekomendasi oleh Inspektorat
11.	Mendorong hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata	Sedang diupayakan perbaikan Akuntabilitas kinerja sesuai hasil evaluasi tersebut

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Pelaksanaan Evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Surat Perintah Kerja Lembur Inspektur Kabupaten Bima Nomor 700/11/LBR/05/2026 tanggal 6 April 2026 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025, dengan tujuan :
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
 - b. Menilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta Dokumen terkait lainnya.
3. Hasil Penilaian adalah sebagai berikut :
 - a) Di dalam melaksanakan penilaian dilakukan pengelompokan predikat, yaitu :

AA = SANGAT MEMUASKAN	INTERVAL = > 90,1 -	100
A = MEMUASKAN	INTERVAL = > 80,1 -	90
BB = SANGAT BAIK	INTERVAL = > 70,1 -	80

B	= BAIK	INTERVAL = > 60,1 -	70
CC	= CUKUP (MEMADAI)	INTERVAL = > 50,1 -	60
C	= KURANG,	INTERVAL = > 30,1 -	50
D	= SANGAT KURANG,	INTERVAL =	0 - 30

- b) Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d. 100, Pemerintah Kabupaten Bima memperoleh nilai sebesar **79,50** dengan peringkat **BB** kategori **Sangat Baik**, interpretasi peringkat tersebut adalah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung, akuntabilitas yang sangat baik, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/Koordinator.
- c) Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2024	Nilai 2025
1	2	3	4	5
a.	Perencanaan Kinerja	30	29,73	29,10
b.	Pengukuran Kinerja	30	23,13	23,40
c.	Pelaporan Kinerja	15	12,01	12,75
d.	Evaluasi Internal/Kinerja	25	14,35	14,25
Nilai Hasil Evaluasi		100	79,22	79,50
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Penjelasan lebih lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Pemerintah Kabupaten Bima telah menerapkan SAKIP sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik. Terdapat kenaikan kualitas implementasi SAKIP dibandingkan dengan kondisi tahun lalu di sebagian komponen SAKIP. Namun dari segi perencanaan kinerja terdapat beberapa catatan, sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan sasaran strategis belum seluruhnya berorientasi hasil dengan indikator kinerja yang Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timebound (SMART) serta belum sepenuhnya menjawab isu strategis yang dihadapi. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan belum berdampak langsung bagi masyarakat;
- Secara umum pohon kinerja pada level Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah (PD) telah disusun, namun masih diperlukan penyempurnaan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini karena pada pohon kinerja yang telah disusun belum teridentifikasi Critical Success Factor (CSF) atau faktor kunci keberhasilan yang secara tepat menggambarkan permasalahan faktual yang terjadi.

Pohon kinerja masih sebatas menerjemahkan kondisi eksisting dan belum mengeksplorasi alternatif solusi atas pemecahan masalah yang relevan dengan kebutuhan kinerja. Akibatnya hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) belum terbangun secara cukup.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan

sebagai berikut:

- Indikator kinerja utama belum seluruhnya disertai definisi operasional. Selain itu, belum sepenuhnya indikator kinerja utama khususnya pada level PD yang dilengkapi dengan satuan yang sesuai dengan indikatornya;
- Pengukuran kinerja organisasi belum dilakukan secara berkala dan hasil pengukuran capaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward and punishment;
- Monitoring dan evaluasi kinerja belum berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak selarasnya capaian kinerja yang diukur dengan perjanjian kinerja yang diperjanjikan pada tahun berjalan. Hal ini disebabkan salah satunya oleh proses pengukuran kinerja yang masih dilakukan secara manual tiap akhir tahun.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan kinerja belum cukup menyampaikan informasi yang memadai di antaranya tentang analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta perbandingan anggaran dengan realisasi kinerja serta rencana tindak lanjut kedepan;

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Pelaksanaan evaluasi internal belum disertai dengan pedoman pelaksanaan sebagai turunan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai.

4. Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan reviu dan menyempurnakan pohon kinerja yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 dengan memperhatikan prinsip teknis penyusunan seperti tidak dihubungkan dulu dengan komponen perencanaan maupun dengan eksisting program/kegiatan sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang. Setelah itu melakukan identifikasi kembali crosscutting kinerja yang melibatkan keseluruhan PD;
- 2) Menjadikan hasil dari pengukuran kinerja masing-masing PD dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja;
- 3) Melakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan menggunakan aplikasi sederhana sehingga hasil pengukuran kinerja yang dilakukan bisa terpantau secara real time serta terpantau keandalan datanya agar kinerja yang dikumpulkan sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan dibutuhkan untuk mencapai capaian kinerja organisasi;
- 4) Memperbaiki penyajian pelaporan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 terutama mengenai penyajian akuntabilitas anggaran dan perbandingannya dengan capain kinerja dan rencana tindak lanjut kedepan;
- 5) Mendorong pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja tahun berikutnya. Khususnya terkait informasi realisasi kinerja sebagai salah satu dasar dalam penetapan target kinerja kedepan agar lebih baik dari realisasi kinerja tahun sebelumnya;
- 6) Menyusun pedoman pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

- 7) Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif dan cukup guna meningkatkan kualitas implementasikan AKIP di setiap PD;
- 8) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja.

BAB III

PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Perangkat Daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi, sehingga tujuan organisasi/instansi dapat tercapai secara optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian reward dan punishment dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Simpulan

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 memperoleh nilai total sebesar **79,50** dengan peringkat **BB** kategori Sangat Baik dan Implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya.

B. Saran

Rekomendasi yang disampaikan agar segera dapat ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, dan meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga akan meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Iwan Setiawan, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197002171999021001

Tembusan : Disampaikan kepada;

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Yth. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB di Mataram;
4. Yth. Inspektur Provinsi NTB di Mataram;
5. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Bima.



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025

**DI SUSUN OLEH :
BAGIAN ORGANISASI**

**PRODUK :
TAHUN 2026**



**Jalan Soekarno - Hata Nomor 1 Woha-Bima (84713)
telepon (0374) 43718, Fax. (0374) 43300
Laman : www.bimakab.go.id
Pos-el : www.bimakab.go.id**



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehinggaa **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban **Pemerintah Kabupaten Bima** atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai implementasi dari **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** sebagaimana diamanatkan dalam **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Melalui laporan ini disajikan informasi mengenai capaian kinerja **Pemerintah Kabupaten Bima** selama Tahun 2025 yang diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

LKjIP ini memuat gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, realisasi indikator kinerja utama, serta analisis terhadap keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi **Pemerintah Kabupaten Bima** dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

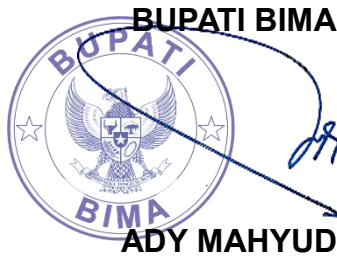
Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan guna penyempurnaan laporan kinerja di masa yang akan datang. Semoga **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025** ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Bima**.



Pemerintah
Kabupaten Bima

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan **Pemerintah Kabupaten Bima** yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Bima, Maret 2026

BUPATI BIMA

ADY MAHYUDI



IKHTISAR

Pemerintah Kabupaten Bima sangat berkomitmen dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang Good Governance dan Clean Government dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan yang baik dan bersih dengan lebih mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu aspek penting dalam penerapan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dari penerima amanah kepada pemberi amanah yang dibuat dalam bentuk laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

Laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) menguraikan tentang hasil capaian serta faktor pendorong dan penghambat dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi dalam kurun waktu satu tahun yang tertuang dalam RPJMD.

RPJMD Kabupaten Bima 2025-2029 dengan visi “**Bima Bermartabat yang Berkemajuan, Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan**” terdiri dari 5 (lima sembilan) misi, 6 (tujuan) Tujuan, 26 (duapuluh enam) sasaran strategis dan 54 (limapuluh empat) indikator kinerja utama (IKU).

RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025-2029 mencakup 5 misi yang dijabarkan menjadi 6 tujuan, 26 sasaran strategis dan 54 indikator kinerja utama (IKU). Pengukuran kinerja pada tahun 2025 dilakukan terhadap capaian sasaran strategis RPJMD. Hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis RPJMD untuk tahun 2025 dari 54 indikator kinerja utama yaitu sebesar 88,88 dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 153.24.

Secara umum, capaian kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik pada sebagian besar indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini terlihat dari berbagai indikator yang mampu mencapai bahkan melampaui target tahunan, khususnya pada bidang pelayanan publik, pembangunan manusia, profesionalitas aparatur, ketahanan pangan, serta sektor pertanian dan perikanan. Beberapa indikator yang menunjukkan capaian sangat baik antara lain Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebesar



120,67 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 101,37 persen, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 100,58 persen, Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB sebesar 112,9 persen, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 99,82 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa berbagai program pembangunan daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan manusia, dan penguatan sektor unggulan daerah.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal dan memerlukan perhatian lebih lanjut. Indikator dengan capaian relatif rendah antara lain Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang hanya mencapai 8,96 persen, Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 36,60 persen, Kontribusi UMKM terhadap PDRB dan Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB yang masing-masing baru mencapai 24,56 persen, serta Indeks Kualitas Air sebesar 63,42 persen. Selain itu, beberapa indikator strategis seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, prevalensi stunting, dan Indeks Risiko Bencana juga masih menghadapi tantangan yang cukup besar dalam pencapaiannya.

Berbagai kendala yang memengaruhi capaian kinerja pembangunan daerah antara lain masih terbatasnya kapasitas fiskal daerah, belum optimalnya kualitas dan pemerataan infrastruktur, rendahnya daya saing sektor industri dan UMKM, keterbatasan investasi, serta masih tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap sektor primer. Selain itu, kualitas lingkungan hidup, risiko bencana, tingkat kemiskinan, dan permasalahan stunting masih menjadi tantangan utama yang membutuhkan penanganan lintas sektor secara lebih intensif. Keterbatasan data pada beberapa indikator seperti Indeks Harmoni, Rasio Konektivitas, dan penurunan emisi GRK juga menjadi hambatan dalam pengukuran capaian pembangunan secara menyeluruh.

Untuk meningkatkan capaian pembangunan daerah pada tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat reformasi birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah



daerah juga akan mendorong pengembangan sektor industri pengolahan, perdagangan, UMKM, investasi, dan ekonomi kreatif guna meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Selain itu, penguatan pengelolaan lingkungan hidup, mitigasi bencana, pengendalian inflasi, penanggulangan kemiskinan dan stunting, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan akan terus menjadi prioritas pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap seluruh indikator sasaran strategis, total kinerja pembangunan daerah Tahun 2025 tercatat sebesar 88,88 dengan rata-rata kinerja sebesar 153,24. Capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bima telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan berbagai upaya perbaikan dan penguatan pada sektor-sektor yang capaian kinerjanya belum optimal agar target RPJMD Tahun 2029 dapat tercapai secara maksimal.

Hambatan dan solusi berdasarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 yang telah disajikan:

Hambatan Pembangunan Daerah

1. Pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi belum kuat
 - Pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah dan belum stabil.
 - Ketergantungan tinggi pada sektor primer (pertanian dan perikanan) dengan nilai tambah rendah.
 - Sektor industri pengolahan, UMKM, dan perdagangan belum berkembang optimal.
2. Kualitas SDM dan ketenagakerjaan masih terbatas
 - Kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.
 - Tingkat pengangguran masih fluktuatif dan penciptaan lapangan kerja belum optimal.
 - Produktivitas tenaga kerja dan pelaku usaha masih rendah.
3. Kemiskinan, stunting, dan ketimpangan masih tinggi
 - Tingkat kemiskinan masih di atas target RPJMD.
 - Prevalensi stunting masih tinggi dan memerlukan intervensi lintas sektor.
 - Ketimpangan pendapatan masih terjadi di beberapa wilayah.
4. Infrastruktur belum merata dan belum optimal



- Konektivitas wilayah dan kualitas jalan belum maksimal.
- Akses infrastruktur dasar di wilayah tertentu masih terbatas.
- Dukungan infrastruktur terhadap ekonomi belum sepenuhnya kuat.
- 5. Kualitas lingkungan hidup dan risiko bencana
 - Kualitas air dan lahan masih rendah.
 - Risiko bencana relatif tinggi.
 - Dampak perubahan iklim belum tertangani secara optimal.
- 6. Kelembagaan ekonomi masyarakat belum kuat
 - Kontribusi UMKM dan koperasi terhadap PDRB masih rendah.
 - Akses permodalan dan pasar terbatas.
 - Digitalisasi usaha belum merata.
- 7. Tata kelola dan data pembangunan belum sepenuhnya optimal
 - Beberapa indikator belum tersedia atau belum terukur (misalnya IKLI, IKH, emisi GRK).
 - Sistem monitoring dan evaluasi belum sepenuhnya terintegrasi.

Solusi

1. Penguatan ekonomi daerah berbasis nilai tambah
 - Hilirisasi sektor pertanian dan perikanan.
 - Pengembangan industri pengolahan dan ekonomi kreatif.
 - Penguatan sektor perdagangan dan pariwisata.
2. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja
 - Penyederhanaan perizinan dan peningkatan iklim investasi.
 - Pengembangan kawasan ekonomi dan pusat pertumbuhan baru.
 - Kemitraan dengan dunia usaha.
3. Penguatan UMKM dan koperasi
 - Akses permodalan dan pembiayaan usaha.
 - Pelatihan kewirausahaan dan digitalisasi usaha.
 - Penguatan pemasaran dan branding produk lokal.
4. Pengurangan kemiskinan dan stunting
 - Intervensi terpadu (gizi, kesehatan, pendidikan, sanitasi).
 - Program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
 - Penguatan koordinasi lintas sektor.



5. Peningkatan kualitas SDM
 - Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja berbasis kebutuhan industri.
 - Peningkatan kualitas pendidikan (literasi dan numerasi).
 - Penguatan kompetensi ASN dan tenaga kerja.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur
 - Peningkatan konektivitas jalan dan wilayah.
 - Pembangunan infrastruktur dasar di desa.
 - Dukungan infrastruktur ekonomi dan layanan publik.
7. Penguatan lingkungan dan mitigasi bencana
 - Rehabilitasi lahan dan pengelolaan air.
 - Pengurangan emisi dan pembangunan rendah karbon.
 - Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana.
8. Penguatan tata kelola pemerintahan
 - Digitalisasi layanan dan data pembangunan.
 - Penguatan SAKIP dan reformasi birokrasi.
 - Peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi berbasis data.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR	lii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kabupaten Bima	2
1.3. Susunan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bima	2
1.4. Sumber Daya Manusia	3
1.5. Su Strategis	4
1.6. Landasan Hukum	4
1.7. Maksud dan Tujuan	5
1.8. Sistematika Penulisan	6
BAB II BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. RPJMD 2025-2029	7
2.2. Rencana Kerja Tahun 2025	14
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Pencapaian Kinerja Organisasi	21
3.1.1. Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Akuntabel, Serta Berdaya Saing Untuk Mencapai Pelayanan Publik Prima.....	21
3.1.2. Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	29
3.1.3. Tujuan 3 Meningkatnya Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan	40
3.1.4. Tujuan 4 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusi ...	43
3.1.5. Tujuan 5 Terwujudnya Masyarakat Yang Harmonis	67



3.1.6. Tujuan 6 Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas	71
3.2. Realisasi Anggaran	76
BAB IV PENUTUP	84
4.1. Kesimpulan.....	84
4.2. Hambatan Pembangunan	84
4.3. Upaya Perbaikan	85
4.4. Penutup	86
LAMPIRAN	
1. Penetapan Kinerja	
2. Rencana Aksi	
3. Cascading	
4. Pohon Kinerja	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bima selama satu tahun anggaran. Penyusunan laporan ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, setiap perangkat daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan secara terarah dan terukur. Oleh karena itu, penyusunan laporan kinerja menjadi salah satu instrumen penting dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

LKjIP Kabupaten Bima Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Melalui laporan ini disajikan informasi mengenai capaian kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama tahun anggaran berjalan.

Bab I Pendahuluan ini menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi Kabupaten Bima yang meliputi kondisi wilayah, susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Bima, kondisi sumber daya manusia aparatur, serta isu-isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan landasan hukum penyusunan laporan, maksud dan tujuan penyusunan LKjIP, hubungan antara dokumen RPJMD



dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta sistematika penulisan laporan.

1.2. GAMBARAN UMUM KABUPATEN BIMA

Kabupaten Bima merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis Kabupaten Bima terletak di bagian timur Pulau Sumbawa dan memiliki wilayah yang cukup luas dengan karakteristik wilayah yang beragam. Luas wilayah Kabupaten Bima tercatat sekitar **438.490 hektar atau sekitar 4.389 km²** yang secara administratif terbagi ke dalam **18 kecamatan dan 191 desa**. Dengan luas wilayah tersebut, Kabupaten Bima memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Kondisi geografis Kabupaten Bima terdiri dari wilayah dataran rendah, perbukitan hingga kawasan pesisir yang memberikan peluang pengembangan berbagai sektor pembangunan seperti sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta sektor lainnya yang berpotensi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, posisi Kabupaten Bima yang berada di wilayah timur Pulau Sumbawa menjadikan daerah ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, khususnya dalam pengembangan potensi wilayah serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

1.3. SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

Pemerintah Kabupaten Bima dipimpin oleh Bupati yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Bupati serta didukung oleh berbagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta melaksanakan program pembangunan daerah. Susunan organisasi Pemerintah Kabupaten Bima diatur dalam **Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bima Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat**



Daerah Kabupaten Bima Berdasarkan peraturan tersebut, organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima terdiri atas:

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Inspektorat
- Dinas Daerah
- Badan Daerah
- Kecamatan

Setiap perangkat daerah memiliki tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, serta berperan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah secara terpadu.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Bima didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Keberadaan ASN memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang tersedia, jumlah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima tercatat sebanyak **10.362 orang** yang tersebar pada berbagai perangkat daerah.

Apabila dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi ASN di Kabupaten Bima cukup beragam mulai dari lulusan sekolah dasar hingga jenjang pendidikan doktoral. Jumlah ASN terbanyak berada pada tingkat pendidikan **Sarjana (S1)** sebanyak **7.553 orang**, sedangkan jumlah ASN paling sedikit terdapat pada tingkat pendidikan **Sekolah Dasar (SD)** sebanyak **6 orang**. Sementara itu apabila dilihat berdasarkan golongan kepangkatan, jumlah ASN terbanyak berada pada **Golongan III** sebanyak **3.958 orang**, sedangkan jumlah ASN paling sedikit berada pada **Golongan I** sebanyak **10 orang**.

Komposisi sumber daya manusia aparatur tersebut memberikan gambaran mengenai kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh



Pemerintah Kabupaten Bima dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

1.5. ISU STRATEGIS

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Bima dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dalam pembangunan daerah Kabupaten Bima adalah upaya mewujudkan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kualitas keimanan, pengetahuan, serta akhlak yang baik menjadi landasan penting dalam mendukung pembangunan daerah.

Penguatan nilai-nilai keagamaan serta peningkatan kualitas pendidikan masyarakat diharapkan dapat membentuk karakter masyarakat yang religius, berintegritas, dan memiliki kemampuan dalam menghadapi berbagai dinamika perkembangan zaman.

1.6. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Adapun landasan hukum penyusunan laporan ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025-2029

1.7. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Bima bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran capaian kinerja pemerintah daerah**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran selama tahun berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

2. Mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik RPJMD, RKPD, maupun Perjanjian Kinerja.

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Melalui penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

4. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja pemerintahan**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik serta pelaksanaan pembangunan daerah.

5. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan

Agar lebih berorientasi pada hasil (result oriented) dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

6. Mendorong peningkatan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah**

Dalam pencapaian target pembangunan daerah secara terintegrasi dan berkelanjutan.

7. Menjadi dasar pengambilan kebijakan dan perencanaan pembangunan selanjutnya.



Guna mendukung percepatan pencapaian target RPJMD dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima..

1.8. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bima Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat gambaran umum Kabupaten Bima, susunan organisasi pemerintah daerah, kondisi sumber daya manusia aparatur, isu strategis, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Memuat dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan daerah termasuk tujuan, sasaran, indikator kinerja serta perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bima berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan serta rekomendasi perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah pada periode berikutnya.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, Pemerintah Kabupaten Bima dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka pendek seperti Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perencanaan tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK).

2.1. RPJMD 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah, memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RPJMD Kabupaten Bima disusun sebagai penjabaran visi, misi dan program dari bupati dan wakil bupati terpilih sebagai dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode (lima) tahun. Sesuai peraturan perundang-undangan maka setelah pasangan Ady Mahyudy dan dr. Irfan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk periode Tahun 2025-2029.

RPJMD 2025-2029 ditujukan untuk melanjutkan kembali kemajuan pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Sehubungan hal tersebut, untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Bima dalam lima Tahun kedepan telah dirumuskan Visi dan Misi Kabupaten Bima sebagai berikut :



**Peraturan Daerah Kabupaten Bima
Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima**



Visi

**“Bima Bermartabat yang Berkemajuan,
Makmur, Tangguh dan Berkelanjutan”**

Misi

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil
2. Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing
3. Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan
4. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan
5. Membangun Kapasitas Pemahaman dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Perbub No. 2 Tahun 2025)
VISI 1 BIMA BERMARTABAT YANG BERKEMAJUAN, MAKMUR, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN			
Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil			
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik prima		Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
		Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing			
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)
			Prevalensi Stunting



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Perbub No. 2 Tahun 2025)
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
			Harapan Lama Sekolah (HLS)
			Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:
			a) Literasi Membaca
			b) Numerasi
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)
			Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)
		Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)
Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui penegakan tata ruang yang berkelanjutan			
3.	Meningkatnya Infrastruktur yang merata dan berkeadilan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio Konektivitas
			Tingkat Kemantapan Jalan
		Rasio Permukiman Layak Huni	
Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan			
4.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif		Pertumbuhan Ekonomi
			Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi
			PDRB per kapita
			Rasio Gini
			Tingkat Kemiskinan
		Meningkatkannya peran sektor pertanian dan	Kontribusi sektor pertanian dan



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Perbub No. 2 Tahun 2025)
		perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	perikanan terhadap PDRB Nilai Tukar Petani (NTP) Nilai Tukar Nelayan (NTN)
		Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
		Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
		Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah	Kontribusi UMKM terhadap PDRB Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB
			Nilai tambah Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)
		Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) Persentase peningkatan nilai investasi
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
		Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)
		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa
		Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda



No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Perbub No. 2 Tahun 2025)
Misi 5 : Membangun Kapasitas Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya			
5.	Terwujudnya masyarakat yang Harmonis		Indeks Harmoni
		Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
		Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas
6.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
		Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air
			Indeks Kualitas Udara
			Indeks Kualitas Lahan
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)
			Persentase Penurunan Emisi GRK: (a) Kumulatif (b) Tahunan

Perumusan tujuan dan sasaran tersebut dilakukan melalui pendekatan kerangka logis. Pendekatan ini akan memberikan uraian terkait keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran beserta indikator tujuan dan sasaran. Hal ini penting untuk memberikan gambaran keselarasan mulai dari visi sampai sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bima pada tahun 2025-2029.

Gambar 2.1
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 1





Gambar 3.2.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 2

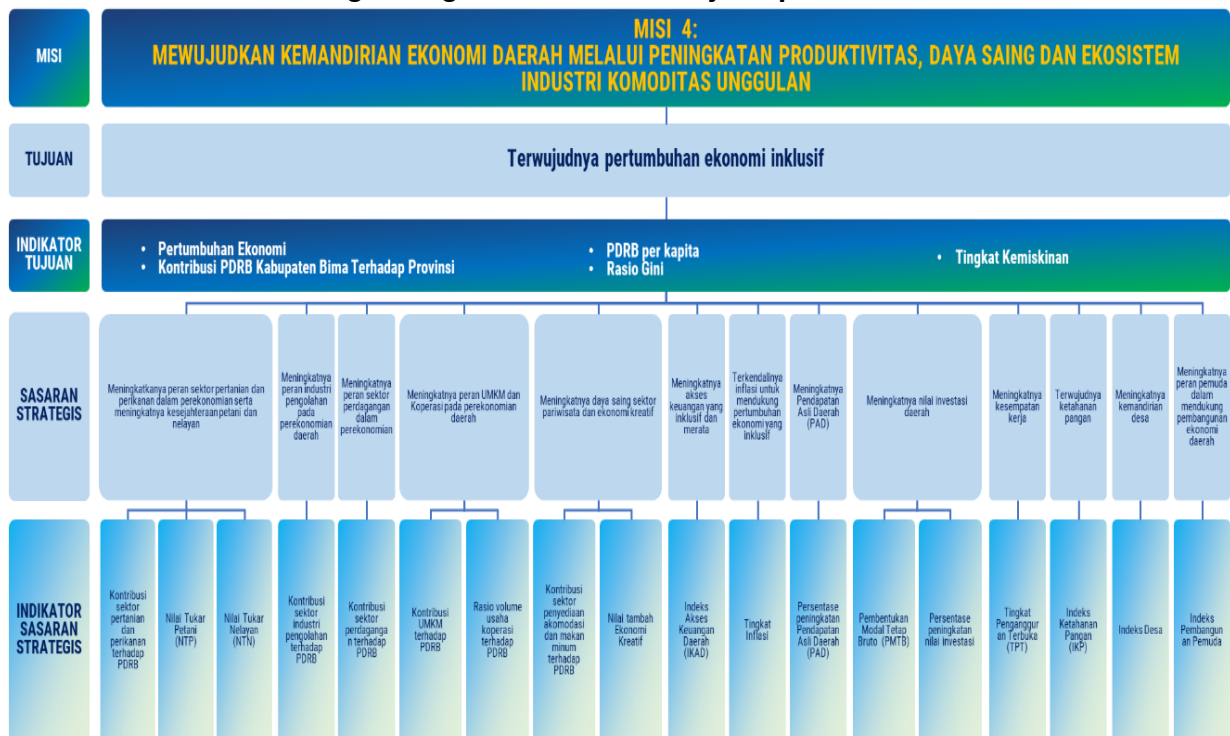


Gambar 3.3.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 3





Gambar 3.3.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 4



Gambar 3.3.
Kerangka Logis Sasaran dan Tujuan pada Misi 5





Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan memiliki ukuran keberhasilan yang terdapat pada indikator tujuan dan indikator sasaran. Masing-masing indikator tersebut dilengkapi target setiap tahun yaitu mulai tahun 2025 s.d 2029. Target ini akan menjadi ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan

2.2. RENCANA KERJA TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berencana Kabupaten Bima merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Tahun ke-1 (Tahun pertama) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025-2029, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sesuai amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2026 – 2029, dan dalam penyusunannya juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat serta Rencana Kerja Pemerintah untuk menjaga keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten dengan sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi dan nasional.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 sesuai dokumen RKT dan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Bima 2025 secara rinci, seperti tabel berikut :



Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60-70)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70-80 (BB)
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,00-78,00
2,	Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	76,50
3.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3-4
		Indeks Pembangunan Manusia	71,00
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,25
		Prevalensi Stunting	30,7
5.	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,56
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,12
		Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	
		a) Literasi Membaca	53,96
		b) Numerasi	31,74
6,	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	30-49,9
		Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	43,11
7.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.439
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	50-60
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	62,23
8,	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	56.73
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	2,49
9,		Rasio Konektivitas	0.49



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Tingkat Kemantapan Jalan	54.71
		Rasio Permukiman Layak Huni	0.735
		Pertumbuhan Ekonomi	5,63-6,05
		Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi	9,47
		PDRB per kapita	32,75
		Rasio Gini	0,344
		Tingkat Kemiskinan	12,18 - 12,08
10.	Meningkatnya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	40.00
		Nilai Tukar Petani (NTP)	124.31
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107.59
11.	Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	3.06-3.08
12.	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	7.54
13.	Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	0.57
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0.57
14.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	0,45
		Nilai tambah Ekonomi Kreatif	511,90
15.	Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3.90
16.	Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi	2,8 - 3,5
17.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.10
18.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	38,02
		Persentase peningkatan nilai investasi	55.5



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
19.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.04-1.99
20.	Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79
21.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	66.56
22.	Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	54
		Indeks Harmoni	5,5 – 6,5
23.	Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	94.00
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	20,01 – 40,00
24.	Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas	75,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,01
25.	Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air	20,8
		Indeks Kualitas Udara	40,019
		Indeks Kualitas Lahan	8,23
26.	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	97,76
		Persentase Penurunan Emisi GRK:	
		(a) Kumulatif	2,15
		(b) Tahunan	19,83

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 tahun, juga merupakan kesepakatan antara pengemban tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah),



selanjutnya merupakan Ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya serta realisasi perjanjian kinerja dilaporkan dalam laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya dalam kerangka perencanaan kinerja jangka menengah. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan perjanjian kinerja adalah 1) Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur; 2) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 3) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi 4) sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi (reward dan punishment); 5) Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 6) Sebagai dasar dalam perjanjian sasaran kinerja pegawai. Perjanjian kinerja tahun 2025 disusun mengacu pada Tujuan, Sasaran, indikator dan Target Kinerja sesuai RPJMD Kabupaten Bima tahun 2025 – 2029, dan telah ditetapkan seperti berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	70
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	77,00



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
2,	Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks	76,50
3.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,00
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,25
		Prevalensi Stunting	Persen	30,7
5.	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,56
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,12
		Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
		a) Literasi Membaca	Persen	53,96
		b) Numerasi	Persen	31,74
6,	Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	30-49,9
		Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Indeks	43,11
7.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.439
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	50-60
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	62,23
8,	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	56.73
		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	2,49
9,	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio Konektivitas	Nilai	0.49
		Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	54.71
		Rasio Permukiman Layak Huni	Nilai	0.735
		Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,63-6,05



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
		Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi	Persen	9,47
		PDRB per kapita	Rp Juta	32,75
		Rasio Gini	Nilai	0,344
		Tingkat Kemiskinan	Persen	12,18 - 12,08
10.	Meningkatnya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	40.00
		Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	124.31
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	107.59
11.	Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	3.06-3.08
12.	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	7.54
13.	Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	0.57
		Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Nilai	0.57
14.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	0,45
		Nilai tambah Ekonomi Kreatif	Rp Milyar	511,90
15.	Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3.90
16.	Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi	Persen	2,8 - 3,5



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
17.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9.10
18.	Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen PDRB	38,02
		Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	55.5
19.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2.04-1.99
20.	Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79
21.	Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	Indeks	66.56
22.	Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54
		Indeks Harmoni	Indeks	5,5 – 6,5
23.	Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	94.00
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	20,01 – 40,00
24.	Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas	Indeks	75,00
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		71,01
25.	Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	20,8
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	40,019
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	8,23
26.	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	97,76
		Persentase Penurunan Emisi GRK:		
		(a) Kumulatif	Persen	2,15
		(b) Tahunan	Persen	19,83



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

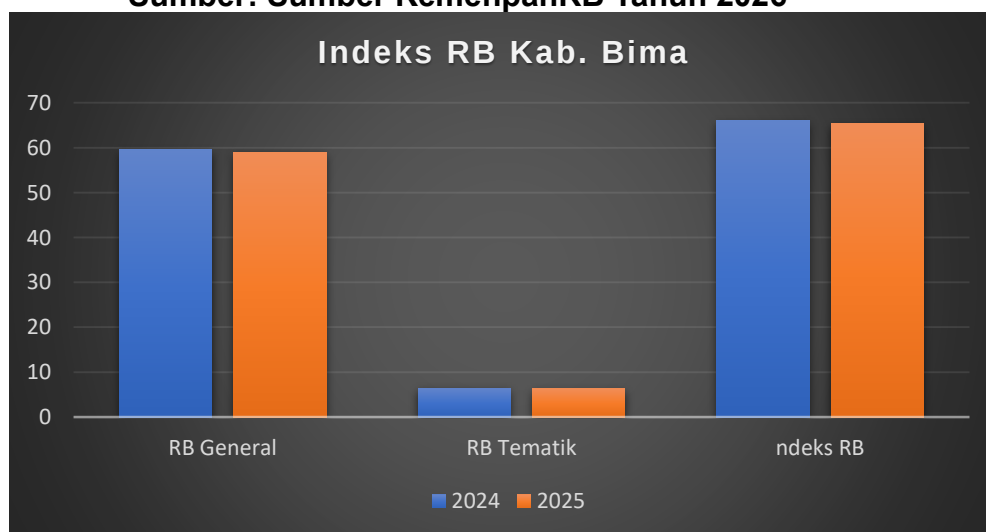
1.1. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3,1,1. Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Akuntabel, Serta Berdaya Saing Untuk Mencapai Pelayanan Publik Prima

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	66.04	70	65,29	93.27	89	73.36

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi tercatat sebesar 65,29 dari target yang ditetapkan sebesar 70 atau mencapai 93,27 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 89, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 73,36 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Bima telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Gambar 3.1.
Indeks RB Kabupaten Bima tahun 2024-2025
Sumber: Sumber KemenpanRB Tahun 2026





Berdasarkan Gambar di atas hasil evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Bima memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB) sebesar 65,29 dengan predikat **B**. Nilai tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar 66,04 dengan predikat yang sama. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh menurunnya nilai pada komponen RB General dari 59,61 pada tahun 2024 menjadi 58,95 pada tahun 2025, serta penurunan nilai RB Tematik dari 6,43 menjadi 6,34.

Meskipun masih berada pada kategori baik, capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Bima masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek tata kelola pemerintahan, efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, dan implementasi reformasi birokrasi tematik. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain belum optimalnya integrasi reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah, keterbatasan inovasi pelayanan publik, belum meratanya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta masih perlunya peningkatan budaya kerja dan manajemen kinerja ASN.

Program dan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Tahun 2025 dialokasikan dengan pagu anggaran sebesar Rp38.048.000 dan terealisasi sebesar Rp38.153.000 atau mencapai 100 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung peningkatan kinerja pemerintahan serta reformasi birokrasi di Kabupaten Bima telah berjalan dengan sangat baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Belum optimalnya implementasi manajemen kinerja, belum meratanya kualitas pelayanan publik antar perangkat daerah.
2. Keterbatasan kapasitas sumber daya aparatur, serta masih perlunya penguatan digitalisasi tata kelola pemerintahan.



3. Koordinasi dan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh perangkat daerah juga masih menjadi tantangan dalam mendukung pencapaian indikator secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi melalui :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja.
2. Penyederhanaan proses bisnis pemerintahan.
3. Optimalisasi penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)/
4. Peningkatan kapasitas aparatur, penguatan pengawasan internal, dan peningkatan sinergi antar perangkat daerah akan terus dilakukan guna menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat.

Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Akuntabel, Serta Berdaya Saing Untuk Mencapai Pelayanan Publik Prima memiliki 3 Sasaran yakni :

Sasaran 1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	63,1 (B)	70	62,75	88,92	90,00	69,72
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	76,57	77	61,55	79,93	83,00	74,16

Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercatat sebesar 62,75 dengan predikat B, dari target yang ditetapkan pada rentang nilai 70–80 atau mencapai 88,92 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 90,00, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 69,72 persen dari target akhir RPJMD. Capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima telah berjalan cukup baik, namun



masih memerlukan penguatan pada aspek perencanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja agar lebih efektif dan berorientasi pada hasil.

Selain itu, **capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** pada tahun 2025 sebesar 61,55 dari target yang ditetapkan pada rentang 77,00–78,00 atau mencapai 79,93 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 83,00, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 74,16 persen dari target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam aspek perencanaan anggaran, kualitas belanja daerah, pengendalian, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan berbasis kinerja.

Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dialokasikan dengan total pagu anggaran sebesar Rp18.877.538.122 dan terealisasi sebesar Rp18.647.054.415 atau mencapai 98,78 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Implementasi SAKIP dan Pelaksanaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima telah berjalan dengan cukup baik dan efektif dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan tertib administrasi.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian kedua indikator tersebut antara lain :

1. Belum optimalnya sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran.
2. Masih terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur dalam pengelolaan kinerja dan keuangan daerah.
3. belum optimalnya pemanfaatan sistem digital dalam tata kelola pemerintahan.
4. Perlunya peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.
5. Konsistensi penerapan manajemen kinerja dan penguatan budaya kerja berbasis hasil juga masih menjadi tantangan dalam mendukung peningkatan nilai SAKIP dan IPKD.



Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat implementasi reformasi birokrasi melalui :

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
2. Optimalisasi sistem pengendalian internal, serta penguatan monitoring dan evaluasi capaian program pembangunan.
3. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan teknis.
4. Memperluas penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
5. Mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sasaran 2 Meningkatnya Profesionalitas dan Integritas ASN

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks	75,98	76,50	75,98*	99,32	80,5	94,39

Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna mewujudkan birokrasi yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Hal tersebut tercermin dari **capaian Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)** pada tahun 2025 yang mencapai 75,98 dari target sebesar 76,50 atau terealisasi sebesar 99,32 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 80,5, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 94,39 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat profesionalitas aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima sudah berada pada kategori baik dan relatif mendekati target akhir yang telah ditetapkan.

Upaya untuk mendukung indikator Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN) didukung dengan Program Kepegawaian Daerah dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2025 dialokasikan dengan total pagu anggaran sebesar Rp3.118.841.400 dan terealisasi sebesar Rp2.594.519.988. Pelaksanaan kedua program tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kualitas aparatur sipil negara, penguatan



manajemen kepegawaian, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya peningkatan profesionalitas ASN, antara lain :

1. Belum meratanya kompetensi aparatur sesuai kebutuhan jabatan.
2. Keterbatasan kesempatan pengembangan kompetensi dan pelatihan.
3. Belum optimalnya penerapan sistem merit dalam pengelolaan kepegawaian.
4. Adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan publik yang semakin dinamis juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitas ASN secara menyeluruh.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat pengembangan kompetensi ASN melalui :

1. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.
2. Peningkatan kualitas manajemen talenta dan penerapan sistem merit.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola kepegawaian.
4. Pemerintah daerah juga akan mendorong peningkatan budaya kerja yang disiplin, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik guna menciptakan aparatur yang profesional, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif.

Sasaran 3 Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3,62	3	3,62*	120,67	5,00	72.40

Capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) tercatat sebesar 3,62 dari target yang ditetapkan pada rentang 3 atau mencapai 120,67 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 5,00, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 72,40 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kabupaten



Bima berada pada kondisi yang cukup baik dan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan.

Pencapaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai Program dan kegiatan yaitu Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Program Pelayanan Penanaman Modal dengan total pagu anggaran sebesar Rp31.388.759.036 dan realisasi anggaran sebesar Rp22.565.009.114. Pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, cepat, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain :

1. Belum meratanya standar pelayanan pada seluruh perangkat daerah.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
3. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan kepada masyarakat.
4. Kapasitas dan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan prima masih perlu terus ditingkatkan agar pelayanan yang diberikan semakin cepat, mudah, dan transparan.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus melakukan pembenahan pelayanan publik melalui :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.
2. Penguatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi penerapan pelayanan berbasis digital.
3. Pemerintah daerah juga akan memperkuat standar operasional prosedur pelayanan.
4. Meningkatkan pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan



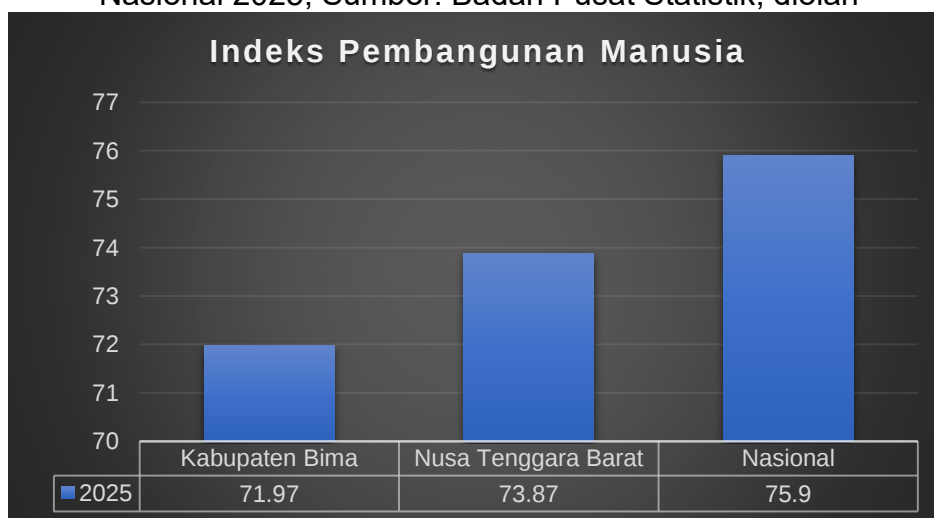
5. Mendorong inovasi pelayanan publik guna menciptakan pelayanan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

3,1,2. Tujuan 2 Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,99	71,00	71,97	101,37	80,50	89,40

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 yang mencapai **71,97** dari target sebesar 71,00 atau terealisasi sebesar 101,37 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 80,50, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 89,40 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kabupaten Bima mengalami perkembangan yang cukup baik dan telah melampaui target tahunan yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi **Nusa Tenggara Barat** yang sebesar **73,97**, IPM Kabupaten Bima masih berada di bawah rata-rata provinsi. Demikian pula jika dibandingkan dengan capaian **Nasional** sebesar **75,90**, IPM Kabupaten Bima masih memerlukan peningkatan agar mampu sejajar dengan rata-rata nasional.

Gambar 3.2.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Nasional 2025, Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah





Pada tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bima tercatat sebesar 71,97. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan, terutama pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebesar 73,97, IPM Kabupaten Bima masih berada di bawah rata-rata provinsi. Demikian pula jika dibandingkan dengan capaian nasional sebesar 75,90, IPM Kabupaten Bima masih memerlukan peningkatan agar mampu sejajar dengan rata-rata nasional.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi peningkatan IPM, antara lain :

1. Belum meratanya kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di seluruh wilayah, terutama pada daerah terpencil.
2. Keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas.
3. Kondisi ekonomi sebagian masyarakat yang masih memengaruhi tingkat kesejahteraan dan daya beli.
4. Kualitas sumber daya manusia dan angka partisipasi pendidikan pada jenjang tertentu masih perlu terus ditingkatkan guna mendukung percepatan pembangunan manusia secara menyeluruh.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan melalui :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan dasar/
2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
3. Perluasan akses pelayanan bagi masyarakat.
4. Pemerintah daerah juga akan mendorong program pengentasan kemiskinan'
5. Peningkatan kesempatan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
6. Mendukung peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Bima.



Sasaran 4 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	71,88	72,25	72,22	99,96	78,25	92,29
Prevalensi Stunting	Persen	36,7	30,7	36,7*	119,54	10,77	340,76

Capaian Usia Harapan Hidup (UHH) tercatat sebesar 72,22 tahun dari target yang ditetapkan sebesar 72,25 tahun atau mencapai 99,96 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 78,25 tahun, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 92,29 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Bima secara umum terus mengalami peningkatan dan mendekati target yang ditetapkan.

Indikator prevalensi stunting pada tahun 2025 tercatat sebesar 36,7 persen dengan target sebesar 30,7 persen. Meskipun persentase capaian tercatat 100 persen berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, angka prevalensi stunting tersebut masih jauh di atas target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 10,77 persen, sehingga perbandingan capaian tahun 2025 terhadap target akhir RPJMD mencapai 340,76 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan secara lebih intensif dan terpadu.

Gambar 3.3.
Prevalensi Stunting Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Nasional 2025, Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah





Berdasarkan perbandingan beberapa indikator sosial ekonomi tahun 2025, kondisi pembangunan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima menunjukkan capaian yang beragam jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun nasional. Pada indikator prevalensi stunting, Kabupaten Bima tercatat sebesar 23,80 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 13,39 persen maupun nasional sebesar 19,80 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan stunting di Kabupaten Bima masih menjadi tantangan serius yang memerlukan penanganan lebih intensif melalui penguatan intervensi gizi, kesehatan ibu dan anak, sanitasi, serta peningkatan kualitas pola hidup sehat masyarakat.

Upaya untuk meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) dan Prevalensi Stunting tahun 2025 didukung oleh 4 program, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Total pagu anggaran sebesar Rp93.023.860.024 terealisasi sebesar Rp90.670.537.299 atau mencapai 95,24 persen. Capaian tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, penguatan sumber daya manusia kesehatan, serta peningkatan akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Beberapa kendala yang memengaruhi pencapaian indikator kesehatan tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait pola hidup sehat dan pemenuhan gizi seimbang.
2. Keterbatasan akses layanan kesehatan dan sanitasi pada beberapa wilayah.
3. Faktor ekonomi keluarga yang memengaruhi kualitas konsumsi gizi masyarakat.



4. Masih terdapat kasus pernikahan usia dini, pola asuh anak yang belum optimal, serta keterbatasan intervensi spesifik dan sensitif dalam percepatan penurunan stunting.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat layanan kesehatan masyarakat melalui:

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar.
2. Penguatan program pencegahan dan penanganan stunting, serta peningkatan edukasi masyarakat mengenai gizi, kesehatan ibu dan anak, dan pola hidup bersih dan sehat.
3. Pemerintah daerah juga akan memperkuat sinergi lintas sektor dalam penyediaan sanitasi, air bersih, dan perlindungan sosial.
4. Meningkatkan intervensi terhadap keluarga berisiko stunting guna mempercepat peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan penurunan prevalensi stunting secara berkelanjutan.

Sasaran 5 Terwujudnya Pendidikan Yang Berkualitas Dan Merata

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,30	8,56	8,61	100,58	9,12	94,41
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,66	14,12	13,67	96,81	14,39	95,00
Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
a) Literasi Membaca	Persen	52,32	53,96	52,32*	96,96	60,52	86,45
b) Numerasi	Persen	29,97	31,74	29,97*	94,42	38,82	77,20

Capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 8,61 tahun dari target sebesar 8,56 tahun atau terealisasi sebesar 100,58 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 9,12 tahun, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 94,41 persen dari target akhir RPJMD. Sementara itu, **Harapan Lama Sekolah (HLS)** mencapai 13,67 tahun dari target sebesar 14,12 tahun atau sebesar 96,81 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 14,39 tahun, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 95,00 persen. Capaian tersebut



menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pendidikan terus mengalami peningkatan dan relatif mendekati target akhir RPJMD.

Selain itu, pada indikator capaian standar kompetensi minimum peserta didik dalam asesmen tingkat nasional, **persentase literasi membaca** mencapai 52,32 persen dari target 53,96 persen atau sebesar 96,96 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 60,52 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 86,45 persen. Sementara itu, **persentase numerasi** mencapai 29,97 persen dari target 31,74 persen atau sebesar 94,42 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 38,82 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 77,20 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan dasar peserta didik, khususnya pada aspek numerasi, masih perlu terus ditingkatkan agar kualitas hasil pembelajaran semakin baik.

Berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2025, total pagu sebesar Rp159.181.291.074 dengan realisasi mencapai Rp105.773.702.606 atau sebesar 66,45 persen. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Pengelolaan Pendidikan, Program Pengembangan Kurikulum, Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan tahun 2025 telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja, meskipun masih diperlukan optimalisasi pelaksanaan beberapa kegiatan agar capaian kinerja dan serapan anggaran pada tahun berikutnya dapat lebih maksimal.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator pendidikan tersebut antara lain :

1. Masih adanya kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.
2. keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.
3. Belum meratanya kompetensi tenaga pendidik dalam menerapkan metode pembelajaran yang adaptif dan berbasis kompetensi.
4. Rendahnya minat baca peserta didik, keterbatasan akses terhadap sumber belajar yang memadai.
5. Dampak sosial ekonomi masyarakat juga turut memengaruhi kualitas hasil belajar peserta didik, khususnya pada kemampuan literasi dan numerasi.



Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat pembangunan sektor pendidikan melalui :

1. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
2. Optimalisasi program pembelajaran berbasis literasi dan numerasi.
3. Pemerintah daerah juga akan mendorong peningkatan akses pendidikan yang merata, pengembangan budaya membaca di lingkungan sekolah dan masyarakat.
4. Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran guna meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing sumber daya manusia di Kabupaten Bima secara berkelanjutan.

Sasaran 6 Meningkatnya Literasi Masyarakat

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	29,46	30-49,9	29,46*	98,20	38,88	75,77
Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Indeks	42,54	43,11	42,54*	98,68	53,58	79,40

Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi dan percepatan transformasi digital di daerah. Pada tahun 2025, **capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)** tercatat sebesar 29,46 dari target yang ditetapkan pada rentang 30–49,9 atau mencapai 98,20 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 38,88, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 75,77 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Bima masih perlu terus ditingkatkan agar budaya membaca dan kemampuan literasi masyarakat semakin berkembang secara merata.

Sementara itu, **capaian Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)** Kabupaten Bima pada tahun 2025 sebesar 42,54 dari target 43,11 atau mencapai 98,68 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 53,58, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 79,40 persen dari target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan



teknologi digital oleh masyarakat terus mengalami perkembangan, meskipun masih diperlukan penguatan pada aspek akses, keterampilan digital, dan pemanfaatan teknologi secara produktif.

Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Literasi Masyarakat didukung oleh 2 program. Program pendukung meliputi : Program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 848.464.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 800.220.500,- dengan serapan anggaran sebesar 94,31%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian kedua indikator tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya minat baca masyarakat, keterbatasan fasilitas dan bahan bacaan yang memadai.
2. Belum optimalnya pemanfaatan perpustakaan dan pusat literasi masyarakat.
3. Aspek digitalisasi, masih terdapat keterbatasan akses jaringan internet di beberapa wilayah.
4. Rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat.
5. Belum meratanya pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas pendidikan, ekonomi, dan pelayanan publik.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus mendorong peningkatan budaya literasi melalui :

1. Penguatan layanan perpustakaan, penyediaan bahan bacaan yang berkualitas.
2. Pengembangan program literasi berbasis masyarakat dan sekolah.
3. Pemerintah daerah juga akan memperkuat transformasi digital melalui peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan pelatihan literasi digital.
4. Serta perluasan pemanfaatan layanan berbasis digital dalam berbagai sektor guna mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Bima yang cerdas, adaptif, dan berdaya saing di era digital.



Sasaran 7 Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak, Serta Kualitas Keluarga

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.479	0.439	0,479	91,65	0 ,339	141,30
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	44.46	50-60	44.46*	88,92	75,00	59,28
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	60.7	62,23	60.7*	97,54	68,37	88,78

Capaian Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tercatat sebesar 0,479 dari target sebesar 0,439 atau mencapai 91,65 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 0,339, maka capaian tahun 2025 berada pada angka 141,30 persen terhadap target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kabupaten Bima masih relatif tinggi sehingga memerlukan perhatian dan upaya yang lebih optimal dalam mewujudkan kesetaraan akses, partisipasi, dan kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan.

Sementara itu, **capaian Indeks Perlindungan Anak (IPA)** pada tahun 2025 sebesar 44,46 dari target rentang 50–60 atau mencapai 88,92 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 75,00, maka capaian tahun 2025 baru mencapai 59,28 persen dari target akhir RPJMD. Selain itu, capaian Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) tercatat sebesar 60,7 dari target 62,23 atau mencapai 97,54 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 68,37, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 88,78 persen dari target akhir RPJMD. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas perlindungan anak dan pembangunan keluarga di Kabupaten Bima terus mengalami perkembangan, namun masih memerlukan penguatan pada berbagai aspek sosial dan kelembagaan.

Upaya untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak, Serta Kualitas Keluarga didukung oleh 6 program. Program pendukung meliputi : Program Pengarusutamaan Gender dan



Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Perlindungan Khusus Anak, Program Pengendalian Penduduk, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS). Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 13.469.180.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 13.096.930.402,- dengan serapan anggaran sebesar 97,24%

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai kesetaraan gender dan perlindungan anak.
2. Keterbatasan akses perempuan terhadap kesempatan ekonomi dan pengambilan keputusan.
3. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4. Kualitas ketahanan keluarga juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat, pola pengasuhan anak yang belum optimal.
5. Keterbatasan layanan pendampingan dan edukasi keluarga di tingkat masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan pembangunan keluarga melalui :

1. Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat.
2. Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan akses layanan pendampingan sosial.
4. Pemerintah daerah juga akan mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan.
5. Memperkuat program ketahanan keluarga, serta meningkatkan sinergi lintas sektor guna menciptakan lingkungan sosial yang aman, inklusif.
6. Mendukung tumbuh kembang anak serta kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.



Sasaran 8 Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	55.73	56.73	46,16	81,37	58,73	78.60

Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) tercatat sebesar 46,16 dari target yang ditetapkan sebesar 56,73 atau mencapai 81,37 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 58,73, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 78,60 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bima masih perlu terus ditingkatkan melalui berbagai intervensi pembangunan sosial yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) tahun 2025 antara lain melalui pelaksanaan program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat rentan, pemberdayaan fakir miskin dan kelompok rentan sosial, peningkatan akses pelayanan sosial dasar, serta pemberian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan peningkatan keterampilan, dukungan usaha ekonomi produktif, serta penguatan kelembagaan sosial masyarakat.

Di bidang pelayanan sosial, telah dilakukan peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah sosial, pendampingan kepada penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak terlantar, serta penguatan peran lembaga kesejahteraan sosial di tingkat daerah. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas data kesejahteraan sosial guna memastikan program bantuan dan intervensi sosial lebih tepat sasaran. Berbagai upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan mendukung pencapaian target RPJMD tahun 2029.

Upaya untuk mewujudkan sasaran Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) didukung oleh 6 program meliputi : Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Program Rehabilitasi Sosial. Pagu



anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 914.066.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 903.847.608,- dengan serapan anggaran sebesar 98,88%.

Belum optimalnya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain :

1. Masih tingginya jumlah masyarakat rentan dan miskin, keterbatasan akses sebagian masyarakat terhadap layanan sosial dasar.
2. Belum optimalnya pemberdayaan kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial.
3. Dampak kondisi ekonomi masyarakat, keterbatasan lapangan kerja.
4. Rendahnya kapasitas sosial dan ekonomi sebagian keluarga juga turut memengaruhi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di Kabupaten Bima.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat program meliputi :

1. Perlindungan dan jaminan sosial.
2. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat rentan.
3. Memperluas akses terhadap pelayanan sosial dasar.
4. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan dan masalah sosial.
5. Memperkuat pendampingan sosial masyarakat.
6. Serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja guna meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.

3,1,3. Tujuan 3 Meningkatnya Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan

Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	NA	2,49	NA	-	3,29	-

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,49, namun capaian kinerja belum dapat diukur atau masih berstatus belum tersedia (NA). Kondisi ini disebabkan belum



dilaksanakannya pengukuran atau belum tersedianya data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur pada tahun berjalan. Meskipun demikian, pemerintah daerah tetap melaksanakan berbagai upaya peningkatan kualitas layanan infrastruktur melalui pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, peningkatan aksesibilitas layanan publik, serta penguatan koordinasi antarperangkat daerah dalam mendukung penyediaan infrastruktur yang lebih baik.

Ke depan, diperlukan penguatan mekanisme pengumpulan data dan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala agar capaian indikator dapat terukur dengan lebih akurat. Selain itu, peningkatan kualitas layanan infrastruktur dan respons terhadap kebutuhan masyarakat perlu terus dilakukan guna mendukung pencapaian target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 3,29.

Belum tersedianya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain :

1. Belum optimalnya mekanisme pengumpulan data dan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur.
2. Keterbatasan sistem monitoring dan evaluasi infrastruktur secara terpadu.
3. Perlunya penyempurnaan metodologi pengukuran indikator agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan representatif.
4. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah masih menghadapi tantangan terkait kondisi geografis, keterbatasan anggaran, dan kebutuhan infrastruktur yang terus meningkat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat sistem pengukuran dan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur melalui :

1. Peningkatan kualitas pengumpulan data, pelaksanaan survei secara berkala.
2. Pengembangan sistem informasi infrastruktur yang terintegrasi.
3. Pemerintah daerah juga akan terus meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, memperkuat perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat.



4. Serta mendorong pemerataan layanan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 9 Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Rasio Konektivitas	Nilai	na	0.49	-	-	0,58	-
Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	53.11	54.71	53.11	97,08	60,51	87,77
Rasio Permukiman Layak Huni	Nilai	0.732	0.735	0.732	99,59	0,764	95,81

Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur daerah guna mendukung konektivitas wilayah, aksesibilitas masyarakat, dan peningkatan kualitas permukiman. Pada tahun 2025, **indikator Rasio Konektivitas** ditargetkan sebesar 0,49 dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 0,58. Namun demikian, capaian indikator tahun 2025 belum tersedia sehingga persentase capaian belum dapat dihitung. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengukuran indikator konektivitas masih memerlukan penyempurnaan data dan evaluasi lebih lanjut untuk memperoleh gambaran kondisi konektivitas wilayah secara akurat.

Sementara itu, **Tingkat Kemantapan Jalan** pada tahun 2025 mencapai 53,11 persen dari target sebesar 54,71 persen atau terealisasi sebesar 97,08 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 60,51 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 87,77 persen dari target akhir RPJMD. Selain itu, **Rasio Permukiman Layak Huni** mencapai 0,732 dari target sebesar 0,735 atau sebesar 99,59 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 0,764, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 95,81 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas infrastruktur dasar dan permukiman di Kabupaten Bima relatif baik dan terus mengalami peningkatan meskipun masih memerlukan penguatan pada beberapa aspek.

Sasaran Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Wilayah didukung oleh 10 program meliputi : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Program Pengelolaan Pelayaran, Program Penyelenggaraan Jalan, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya,



Program Penataan Bangunan Gedung, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Program Kawasan Permukiman dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 109.101.126.010,- dengan realisasi sebesar Rp. 102.635.329.783,- dengan serapan anggaran sebesar 94,07%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Keterbatasan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
2. Kondisi geografis wilayah yang cukup luas dan menantang
3. Serta tingginya kebutuhan pembangunan jalan dan permukiman di berbagai wilayah.
4. Faktor cuaca dan bencana alam juga turut memengaruhi kondisi infrastruktur jalan dan kualitas lingkungan permukiman masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut :

1. Pemerintah Kabupaten Bima akan terus meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan.
2. Memperkuat konektivitas antarwilayah.
3. Serta mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur dasar hingga ke wilayah terpencil.
4. Pemerintah daerah juga akan memperkuat program peningkatan kualitas permukiman melalui penyediaan sarana dan prasarana dasar, penataan lingkungan permukiman.
5. Serta peningkatan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan berbagai pihak guna mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

3,1,4. Tujuan 4 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

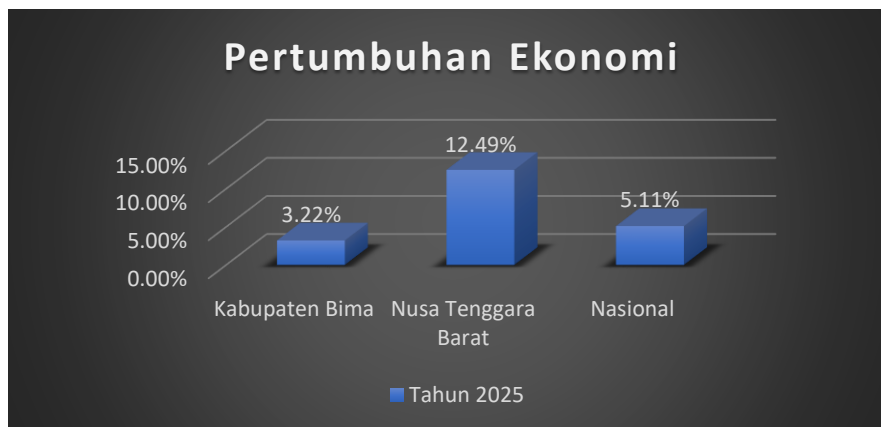
Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Pertumbuhan Ekonomi	Persen	2,82	6,05	3,22	53,22	5,81	55,42
Kontribusi PDRB Kabupaten Bima terhadap Provinsi	Persen	8,10	9,47	8,12	85,74	10,46	77,63



Indikator Tujuan	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
PDRB per kapita	Rp Juta	27,15	32,75	28,10	85,80	72,32	38,86
Rasio Gini	Nilai	0,358	0,344	0,356	96,63	0,314	113,38
Tingkat Kemiskinan	Persen	13,88	12,08	13,60	89,56	9,02	150,78

Pada tahun 2025, **pertumbuhan ekonomi** Kabupaten Bima tercatat sebesar 3,22 persen dari target sebesar 6,05 persen atau mencapai 53,22 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 5,81 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 55,42 persen dari target akhir RPJMD.

Gambar 3.4.
Pertumbuhan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Nasional 2025, Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah



Pada indikator pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Bima mencatat pertumbuhan sebesar 3,22 persen, masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 12,49 persen dan nasional sebesar 5,11 persen. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima dibandingkan provinsi dan nasional menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih memerlukan penguatan, khususnya pada sektor industri pengolahan, perdagangan, investasi, dan pengembangan sektor unggulan berbasis nilai tambah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bima perlu terus mendorong transformasi ekonomi daerah melalui peningkatan investasi, pengembangan UMKM, penguatan sektor produktif, dan peningkatan kualitas infrastruktur guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



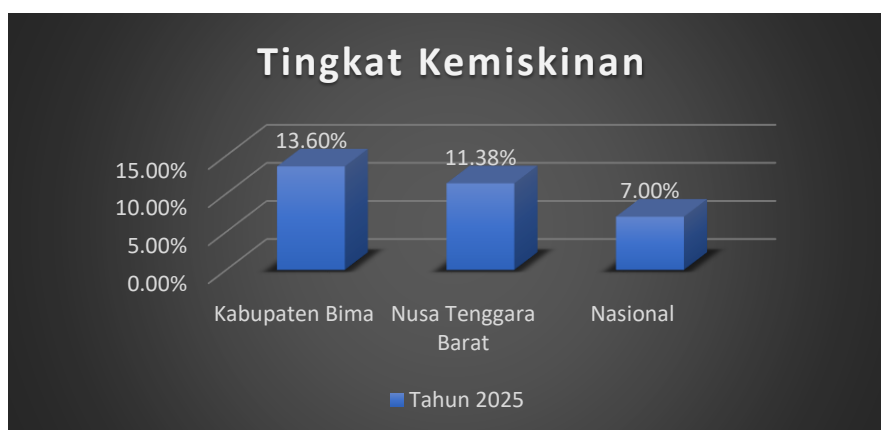
Selain itu, **kontribusi PDRB Kabupaten Bima terhadap Provinsi** mencapai 8,12 persen dari target 9,47 persen atau sebesar 85,74 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 10,46 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 77,63 persen dari target akhir RPJMD.

Pada indikator **PDRB per kapita**, capaian tahun 2025 sebesar Rp28,10 juta dari target Rp32,75 juta atau mencapai 85,80 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar Rp72,32 juta, maka capaian tahun 2025 baru mencapai 38,86 persen.

Sementara itu, **Rasio Gini** tahun 2025 tercatat sebesar 0,356 dari target 0,344 atau mencapai 96,63 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 0,314, maka capaian tahun 2025 berada pada angka 113,38 persen terhadap target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat masih relatif tinggi dan memerlukan perhatian lebih lanjut.

Di sisi lain, **tingkat kemiskinan** pada tahun 2025 tercatat sebesar 13,60 persen dari target 12,08 persen atau mencapai 89,56 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 9,02 persen, maka capaian tahun 2025 berada pada angka 150,78 persen terhadap target akhir RPJMD, yang menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi dibandingkan target yang diharapkan.

Gambar 3.5.
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Nasional 2025, Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah





Angka kemiskinan, Kabupaten Bima mencatat angka sebesar 13,60 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 11,38 persen dan nasional sebesar 7,00 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama terkait keterbatasan akses ekonomi, produktivitas masyarakat, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan kesempatan kerja dan usaha produktif.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator ekonomi tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya diversifikasi ekonomi daerah.
2. Rendahnya produktivitas sebagian sektor usaha masyarakat.
3. Keterbatasan investasi dan lapangan kerja.
4. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor primer yang rentan terhadap perubahan cuaca dan fluktuasi harga.
5. Belum optimalnya pemerataan pembangunan ekonomi antarwilayah
6. Keterbatasan akses permodalan dan pemasaran usaha, serta rendahnya daya beli sebagian masyarakat juga turut memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus mendorong penguatan sektor-sektor ekonomi unggulan melalui

1. Peningkatan investasi, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
2. Peningkatan produktivitas sektor pertanian, perdagangan, dan jasa.
3. Pemerintah daerah juga akan memperkuat program pengentasan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja.
4. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan, bantuan usaha produktif.
5. Peningkatan akses permodalan dan pasar. Selain itu, pembangunan infrastruktur ekonomi.



6. Penguatan sinergi lintas sektor akan terus dilakukan guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Sasaran 10 Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian serta Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	45.16	40.00	45.16*	112,9	36 ,00	125,44
Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	123.31	124.31	123.31*	99,20	119,00	103,62
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	105.59	107.59	105.59*	98,14	120,00	87,99

Upaya memperkuat sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah dan sumber penghidupan utama masyarakat. Pada tahun 2025, **kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB** tercatat sebesar 45,16 persen dari target yang ditetapkan sebesar 40,00 persen atau mencapai 112,9 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 36,00 persen, maka capaian tahun 2025 mencapai 125,44 persen dari target akhir RPJMD. Tingginya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Bima masih didominasi oleh sektor pertanian dan perikanan.

Sementara itu, **Nilai Tukar Petani (NTP)** pada tahun 2025 mencapai 123,31 dari target sebesar 124,31 atau terealisasi sebesar 99,20 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 119,00, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 103,62 persen dari target akhir RPJMD. Adapun **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** tercatat sebesar 105,59 dari target 107,59 atau mencapai 98,14 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 120,00, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 87,99 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani dan nelayan relatif cukup baik, meskipun masih memerlukan upaya peningkatan agar lebih stabil dan berkelanjutan.



Sasaran Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan Dalam Perekonomian Serta Meningkatnya Kesejahteraan Petani Dan Nelayan didukung oleh 9 program meliputi : Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Penyuluhan Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 42.476.339.799,- dengan realisasi sebesar Rp. 41.826.988.909,- dengan serapan anggaran sebesar 98,47%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Masih tingginya ketergantungan terhadap sektor primer dengan produktivitas yang belum optimal.
2. Fluktuasi harga komoditas pertanian dan hasil perikanan.
3. Keterbatasan akses permodalan dan teknologi, serta pengaruh perubahan iklim dan kondisi cuaca terhadap hasil produksi.
4. Keterbatasan infrastruktur pendukung, akses pasar, dan pengolahan hasil produksi juga menjadi tantangan dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan perikanan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian dan perikanan melalui :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung.
2. Penguatan akses permodalan, penerapan teknologi tepat guna, serta peningkatan kapasitas petani dan nelayan.
3. Pemerintah daerah juga akan memperkuat hilirisasi dan pengolahan hasil produksi.
4. Memperluas akses pemasaran, serta meningkatkan perlindungan terhadap petani dan nelayan guna menciptakan sektor pertanian dan



perikanan yang lebih produktif, berdaya saing, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 11 Meningkatnya Peran Industri Pengolahan Pada Perekonomian Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	2.76	3.06	2.76	8,96	4 ,73	58,35

Pemerintah Daerah Kabupaten Bima menetapkan target **kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** pada tahun 2025 sebesar 3,06 persen. Hingga capaian tahun 2025, realisasi yang dicapai tercatat sebesar 2,76 persen atau sekitar 90,20 persen dari target tahunan yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 4,73 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai sekitar 58,35 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian daerah masih perlu terus ditingkatkan melalui pengembangan hilirisasi produk unggulan daerah, peningkatan investasi sektor industri, penguatan kapasitas pelaku usaha industri kecil dan menengah, serta penyediaan dukungan infrastruktur dan kemudahan perizinan guna mendorong pertumbuhan sektor industri pengolahan di Kabupaten Bima.

Sasaran Meningkatnya Peran Industri Pengolahan Pada Perekonomian Daerah didukung oleh 2 program meliputi : Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.255.433.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.109.823.683,- dengan serapan anggaran sebesar 88,40%.

Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor industri pengolahan antara lain :

1. Masih terbatasnya jumlah industri berskala menengah dan besar.
2. Rendahnya nilai tambah produk hasil pertanian dan perikanan.



3. Keterbatasan akses permodalan dan teknologi produksi, serta belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung distribusi dan pemasaran.
4. Kapasitas sumber daya manusia pelaku industri dan daya saing produk lokal juga masih perlu ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Untuk mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bima terus mendorong pengembangan industri berbasis potensi lokal melalui:

1. Peningkatan pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha
2. Fasilitasi akses pembiayaan dan investasi, penguatan kemitraan dengan sektor swasta
3. Pengembangan kawasan sentra industri dan UMKM
4. Peningkatan kualitas infrastruktur, pemanfaatan teknologi pengolahan, dan perluasan akses pemasaran produk lokal juga menjadi langkah strategis guna meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran 12 Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Persen	0,09	7,54	2,76	36,60	9,41	29,33

Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian daerah sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2025, capaian indikator **meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian** tercatat sebesar 2,76 persen, dari target yang ditetapkan sebesar 7,54 persen atau mencapai 36,60 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 9,41 persen, maka capaian tahun 2025 baru mencapai 29,33 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan masih perlu terus ditingkatkan agar mampu memberikan dampak yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.



Sasaran Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian didukung oleh 4 program meliputi : Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.094.381.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.079.112.474,- dengan serapan anggaran sebesar 98,60%.

Belum optimalnya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain :

1. Masih terbatasnya aktivitas perdagangan yang berkembang secara berkelanjutan
2. Rendahnya daya saing pelaku usaha kecil dan menengah
3. Keterbatasan akses pemasaran dan distribusi barang
4. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan perdagangan.
5. Fluktuasi daya beli masyarakat dan kondisi infrastruktur pendukung perdagangan di beberapa wilayah juga turut memengaruhi pertumbuhan sektor perdagangan di Kabupaten Bima.

Dalam rangka mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus mendorong penguatan sektor perdagangan melalui :

1. Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan pedagang lokal
2. Pengembangan akses pasar dan jaringan distribusi
3. Pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk.
4. Memperkuat sinergi antar sektor
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung perdagangan, serta memperluas promosi produk unggulan daerah guna meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian Kabupaten Bima secara berkelanjutan.



Sasaran 13 Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada Perekonomian Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	0.14	0.57	0.14	24,56	1,18	11,86
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Nilai	0.14	0.57	0.14	24,56	1,18	11,86

Kontribusi UMKM terhadap PDRB tercatat sebesar 0,14 persen dari target sebesar 0,57 persen atau mencapai 24,56 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 1,18 persen, maka capaian tahun 2025 baru mencapai 11,86 persen dari target akhir RPJMD. Demikian pula, **rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB** tercatat sebesar 0,14 dari target 0,57 atau mencapai 24,56 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 1,18, maka capaian tahun 2025 juga baru mencapai 11,86 persen dari target akhir RPJMD. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi UMKM dan koperasi terhadap perekonomian daerah masih relatif rendah dan memerlukan penguatan yang lebih optimal.

Sasaran Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada Perekonomian Daerah didukung oleh 3 program meliputi : Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dan Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1195.563.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 194.446.904,- dengan serapan anggaran sebesar 99,43%.

Belum optimalnya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain :

1. Masih terbatasnya kapasitas usaha dan daya saing UMKM dan koperasi
2. Rendahnya akses terhadap permodalan dan pembiayaan usaha
3. Keterbatasan akses pasar dan pemasaran produk
4. Pemanfaatan teknologi digital dan inovasi usaha masih belum optimal, sementara sebagian pelaku UMKM dan koperasi juga masih menghadapi kendala dalam pengelolaan usaha, legalitas, dan pengembangan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing.



Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus mendorong penguatan UMKM dan koperasi melalui :

1. Peningkatan akses permodalan, pelatihan dan pendampingan usaha
2. Pengembangan kapasitas manajemen dan kewirausahaan
3. Memperluas akses pemasaran produk lokal
4. Mendorong digitalisasi UMKM dan koperasi,
5. Memperkuat kemitraan usaha dan pengembangan produk unggulan daerah
6. Penguatan kelembagaan koperasi dan dukungan terhadap inovasi usaha akan terus dilakukan guna meningkatkan kontribusi UMKM dan koperasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 14 Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target Tahun 2025	Capaian Tahun 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	0,38	0,45	0,38*	84,44	0,58	65,52
Nilai tambah Ekonomi Kreatif	Rp. Milyar	420,982	511,90	420,982*	82,24	1.846 ,219	22,80

Pengembangkan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, serta usaha penyediaan akomodasi dan makan minum sebagai salah satu sektor potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun 2025, **kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB** tercatat sebesar 0,38 persen dari target sebesar 0,45 persen atau mencapai 84,44 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 0,58 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 65,52 persen dari target akhir RPJMD. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor akomodasi dan makan minum masih memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan guna meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah.



Sementara itu, **nilai tambah ekonomi kreatif** pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp420,982 miliar dari target sebesar Rp511,90 miliar atau mencapai 82,24 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar Rp1.846,219 miliar, maka capaian tahun 2025 baru mencapai 22,80 persen dari target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Bima masih memerlukan percepatan dan penguatan agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sasaran Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif didukung oleh 4 program meliputi : Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.766.685.550,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.753.848.800,- dengan serapan anggaran sebesar 99,27%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain

1. Masih terbatasnya pengembangan destinasi wisata dan fasilitas pendukung
2. Rendahnya promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif
3. Keterbatasan kapasitas pelaku usaha dalam inovasi dan pengembangan produk
4. Akses permodalan, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pengembangan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif juga masih belum optimal.
5. Kondisi infrastruktur pendukung dan tingkat kunjungan wisatawan yang belum stabil turut memengaruhi pertumbuhan sektor ini.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus mendorong pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui :

1. Peningkatan kualitas destinasi wisata, penguatan promosi daerah



2. Pengembangan produk kreatif berbasis potensi lokal
3. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan pendampingan
4. Memperluas akses pemasaran dan digitalisasi usaha
5. Memperkuat dukungan infrastruktur dan kemitraan investasi guna meningkatkan daya saing sektor akomodasi, kuliner, dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.

Sasaran 15 Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3,85	3,90	3,85*	98,72	4,01	96,01

Akses masyarakat terhadap layanan keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025, **capaian Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)** tercatat sebesar 3,85 dari target yang ditetapkan sebesar 3,90 atau mencapai 98,72 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 4,01, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 96,01 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan di Kabupaten Bima sudah berada pada kondisi yang cukup baik dan mendekati target akhir RPJMD.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan IKAD antara lain melalui penguatan inklusi keuangan masyarakat, perluasan akses layanan perbankan dan lembaga keuangan, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan transaksi keuangan berbasis digital. Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong sinergi dengan lembaga perbankan, pelaku usaha, dan instansi terkait dalam mendukung kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Berbagai upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan layanan keuangan secara merata guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.



Sasaran Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata didukung oleh Program Perekonomian dan Pembangunan dengan Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.634.251.700,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.574.951.518,- dengan serapan anggaran sebesar 96,37%.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi peningkatan akses keuangan daerah, antara lain :

1. Belum meratanya akses layanan keuangan formal di seluruh wilayah, terutama pada daerah terpencil,
2. Rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat
3. Keterbatasan pemanfaatan layanan keuangan digital oleh sebagian pelaku usaha dan masyarakat
4. Akses pembiayaan bagi UMKM dan kelompok usaha produktif juga masih menghadapi berbagai kendala terkait persyaratan administrasi dan kapasitas usaha.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat program literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui :

1. Edukasi dan sosialisasi layanan keuangan formal
2. Mendorong pengembangan layanan keuangan digital, serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM dan pelaku usaha produktif
3. Pemerintah daerah juga akan memperkuat sinergi dengan lembaga keuangan
4. Meningkatkan dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat
5. Serta mendorong pemerataan akses layanan keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran 16 Terkendalnya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Tingkat Inflasi	Persen	2,30	2,80	2,94	84	2,33	126,18



Menjaga stabilitas perekonomian daerah melalui pengendalian inflasi guna melindungi daya beli masyarakat dan menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2025, **tingkat inflasi Kabupaten Bima** tercatat sebesar 2,94 persen dari target yang ditetapkan sebesar 2,80 persen atau mencapai 84 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 2,33 persen, maka capaian tahun 2025 berada pada angka 126,18 persen terhadap target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi masih berada di atas target yang diharapkan sehingga memerlukan langkah pengendalian yang lebih optimal.

Peningkatan inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok komoditas, terutama bahan pangan, transportasi, dan kebutuhan pokok masyarakat akibat fluktuasi pasokan, distribusi, serta perubahan harga pasar. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, antara lain melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok, pelaksanaan operasi pasar, pengendalian distribusi barang kebutuhan masyarakat, serta peningkatan kerja sama antarwilayah dalam menjaga stabilitas pasokan pangan. Upaya tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian tingkat inflasi antara lain :

1. Fluktuasi harga bahan kebutuhan pokok
2. Gangguan distribusi barang akibat kondisi cuaca dan infrastruktur
3. Tingginya ketergantungan terhadap pasokan komoditas tertentu dari luar daerah
4. Peningkatan permintaan masyarakat pada periode tertentu
5. Perubahan harga energi, dan keterbatasan produksi beberapa komoditas pangan juga turut memengaruhi stabilitas harga di daerah.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi melalui :

1. Penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)



2. Pemantauan harga dan ketersediaan bahan pokok secara berkala
3. Menjaga kelancaran distribusi barang dan stabilitas pasokan pangan
4. Mendorong peningkatan produksi komoditas strategis, pengembangan cadangan pangan daerah
5. Pelaksanaan operasi pasar dan kerja sama antar daerah guna menjaga kestabilan harga dan daya beli masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 17 Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	8,13	9,10	8,13	89,34	10,03	81,06

Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pada tahun 2025, **persentase peningkatan PAD** tercatat sebesar 8,13 persen dari target yang ditetapkan sebesar 9,10 persen atau mencapai 89,34 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 10,03 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 81,06 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD Kabupaten Bima telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan berbagai upaya optimalisasi agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal.

Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.804.674.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.240.183.362,- dengan serapan anggaran sebesar 68,72%.

Belum optimalnya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain :

1. Masih terbatasnya potensi sumber-sumber PAD yang tergali secara optimal
2. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah
3. Belum maksimalnya pengelolaan aset daerah sebagai sumber pendapatan



4. Kondisi perekonomian masyarakat yang belum sepenuhnya stabil
5. Keterbatasan sistem digitalisasi pelayanan pendapatan, serta belum optimalnya pengawasan dan pendataan objek pajak dan retribusi juga turut memengaruhi capaian PAD daerah.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus melakukan optimalisasi pengelolaan PAD melalui :

1. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
2. Penguatan sistem pendataan dan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan pembayaran berbasis digital.
3. Pemerintah daerah juga akan mendorong pemanfaatan aset daerah secara produktif
4. Memperkuat koordinasi antar perangkat daerah pengelola pendapatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak dan retribusi guna memperkuat kemandirian fiskal daerah secara berkelanjutan.

Sasaran 18 Meningkatnya Nilai Investasi Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen PDRB	37,95	38,02	37,95	99,82	38,23	99,27
Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	49,87	55,50	49,87	89,37	80,50	61,95

Upaya mendorong peningkatan investasi dan penguatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan aktivitas ekonomi produktif. Pada tahun 2025, capaian Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tercatat sebesar 37,95 persen terhadap PDRB dari target sebesar 38,02 persen atau mencapai 99,82 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 38,23 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 99,27 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa aktivitas pembentukan modal dan investasi fisik di Kabupaten Bima relatif stabil dan telah mendekati target akhir RPJMD.



Sementara itu, persentase peningkatan nilai investasi pada tahun 2025 tercatat sebesar 49,87 persen dari target sebesar 55,50 persen atau mencapai 89,37 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 80,50 persen, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 61,95 persen dari target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi di Kabupaten Bima terus mengalami perkembangan, meskipun masih diperlukan percepatan untuk mencapai target jangka menengah daerah secara optimal.

Sasaran Meningkatnya Nilai Investasi Daerah didukung oleh 3 program meliputi : Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 394.291.750,- dengan realisasi sebesar Rp. 392.309.574,- dengan serapan anggaran sebesar 99,50%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. mMsih terbatasnya daya tarik investasi di beberapa sektor potensial
2. Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi, serta belum optimalnya promosi peluang investasi daerah
3. Proses perizinan, keterbatasan kualitas sumber daya manusia, dan kondisi ekonomi global maupun nasional juga turut memengaruhi minat investasi di daerah
4. Keterbatasan akses pembiayaan dan pengembangan kawasan ekonomi produktif juga menjadi tantangan dalam mendorong peningkatan investasi secara lebih luas.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat iklim investasi melalui :

1. Penyederhanaan pelayanan perizinan
2. Peningkatan kualitas infrastruktur pendukung, serta penguatan promosi potensi investasi daerah
3. Mendorong pengembangan sektor-sektor unggulan
4. Memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha dan investor



5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kepastian berusaha guna menciptakan lingkungan investasi yang lebih kompetitif, produktif, dan berkelanjutan di Kabupaten Bima.

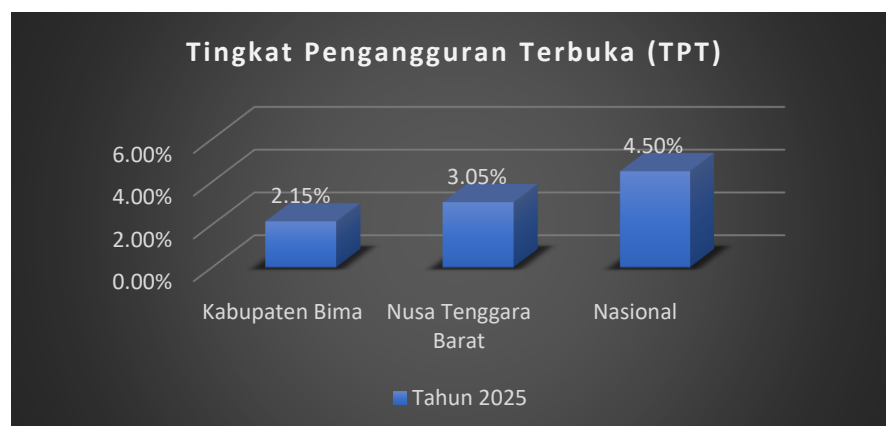
Sasaran 19 Meningkatnya Kesempatan Kerja

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,15	2,04	2,15	105,39	1,95	110,26

Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya meningkatkan kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran melalui pengembangan sektor ekonomi produktif dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Pada tahun 2025, **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** tercatat sebesar 2,15 persen dari target yang ditetapkan sebesar 2,04 persen atau mencapai 105,39 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 1,95 persen, maka capaian tahun 2025 berada pada angka 110,26 persen terhadap target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bima masih sedikit lebih tinggi dibandingkan target yang diharapkan sehingga diperlukan upaya yang lebih optimal dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Gambar 3.6.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, dan Nasional 2025, Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah





Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Kabupaten Bima mencatat capaian sebesar 2,15 persen, lebih rendah dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,05 persen maupun nasional sebesar 4,50 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Kabupaten Bima relatif lebih baik dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Rendahnya tingkat pengangguran tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap dalam aktivitas ekonomi, meskipun masih didominasi oleh sektor informal dan sektor primer.

Sasaran Meningkatnya Kesempatan Kerja didukung oleh 2 program meliputi : Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, dan Program Penempatan Tenaga Kerja. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.646.473.450,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.492.521.200,- dengan serapan anggaran sebesar 90,65%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya ketersediaan lapangan kerja formal
2. Rendahnya keterampilan dan kompetensi sebagian tenaga kerja yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri
3. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor informal dan sektor primer.
4. Pertumbuhan investasi dan pengembangan usaha yang belum merata juga turut memengaruhi kemampuan daerah dalam menciptakan peluang kerja baru secara lebih luas.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus mendorong peningkatan kesempatan kerja melalui :

1. Pengembangan sektor usaha produktif
2. Penguatan UMKM, dan peningkatan investasi daerah
3. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi
4. Program peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan pasar kerja
5. Penguatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri serta perluasan



6. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat akan terus dilakukan guna menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 20 Terwujudnya Ketahanan Pangan

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,26	79,00	78,26	99,06	83,00	94,29

Capaian Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tercatat sebesar 78,26 dari target yang ditetapkan sebesar 79,00 atau mencapai 99,06 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 83,00, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 94,29 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Bima relatif baik dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Sasaran Terwujudnya Ketahanan Pangan didukung oleh 3 program meliputi : Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 973.577.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 938.161.186,- dengan serapan anggaran sebesar 96,36%.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi peningkatan ketahanan pangan daerah, antara lain

1. Fluktuasi produksi pangan akibat perubahan iklim dan kondisi cuaca
2. Keterbatasan infrastruktur pertanian dan distribusi pangan
3. Masih adanya wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan
4. Keterbatasan diversifikasi pangan masyarakat
5. Rendahnya nilai tambah hasil pertanian, dan tingginya ketergantungan terhadap komoditas tertentu juga menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan daerah.



Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat sektor pertanian dan ketahanan pangan melalui:

1. Peningkatan produksi pangan, penguatan cadangan pangan daerah, serta pengembangan infrastruktur pendukung pertanian dan distribusi pangan.
2. Pemerintah daerah juga akan mendorong diversifikasi konsumsi pangan lokal
3. Meningkatkan kapasitas petani, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengendalian kerawanan pangan guna mewujudkan ketahanan pangan daerah yang lebih kuat, stabil, dan berkelanjutan.

Sasaran 21 Meningkatnya kemandirian desa

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Desa	Indeks	63,56	66,56	63,56*	95,49	86,56	73,43

Capaian **Indeks Desa** tercatat sebesar 63,56 dari target yang ditetapkan sebesar 66,56 atau mencapai 95,49 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 86,56, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 73,43 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa perkembangan pembangunan desa di Kabupaten Bima terus mengalami peningkatan, meskipun masih diperlukan berbagai upaya percepatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan capaian Indeks Desa antara lain melalui peningkatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar desa seperti jalan lingkungan, sarana air bersih, sanitasi, dan jaringan telekomunikasi. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan tata kelola pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa menjadi lebih efektif dan akuntabel.



Selain itu, dilakukan pengembangan ekonomi desa berbasis potensi lokal melalui pemberdayaan UMKM, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta dukungan terhadap sektor pertanian, perikanan, dan usaha produktif masyarakat desa. Upaya lainnya dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar di desa, khususnya pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, termasuk peningkatan akses layanan digital dan administrasi masyarakat.

Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dan sinergi program lintas perangkat daerah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa agar intervensi program lebih tepat sasaran dan mampu mempercepat peningkatan status dan kemandirian desa secara berkelanjutan.

Sasaran Meningkatnya kemandirian desa didukung oleh 3 program meliputi : Program Peningkatan Kerja Sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.560.833.025,- dengan realisasi sebesar Rp 1.524.673.260,- dengan serapan anggaran sebesar 97,68%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya infrastruktur dasar dan pelayanan publik di beberapa desa
2. Rendahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur desa, serta keterbatasan akses ekonomi dan teknologi di wilayah perdesaan
3. Kondisi geografis, keterbatasan aksesibilitas antarwilayah
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lokal juga menjadi tantangan dalam meningkatkan status dan kemandirian desa secara menyeluruh.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat pembangunan desa melalui :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar



2. Penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis masyarakat
3. Pemerintah daerah juga akan mendorong peningkatan pelayanan dasar
4. Penguatan pemberdayaan masyarakat desa, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi dan inovasi desa guna menciptakan desa yang mandiri, maju, dan berdaya saing secara berkelanjutan.

Sasaran 22 Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67	54,00	53,67*	99,39	58,00	92,53

Capaian **Indeks Pembangunan Pemuda** tercatat sebesar 53,67 dari target yang ditetapkan sebesar 54,00 atau mencapai 99,39 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 58,00, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 92,53 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan pemuda di Kabupaten Bima telah berjalan cukup baik dan mendekati target akhir yang telah ditetapkan.

Sasaran oleh program ogram Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 649.850.000,- dengan realisasi sebesar Rp 555.640.000,- dengan serapan anggaran sebesar 85,50%.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda, antara lain :

1. masih terbatasnya akses pemuda terhadap pelatihan keterampilan dan kesempatan kerja
2. Rendahnya partisipasi sebagian pemuda dalam kegiatan produktif dan kewirausahaan, serta keterbatasan sarana pengembangan kreativitas dan potensi pemuda.



3. Pengaruh perkembangan sosial dan teknologi yang cepat juga menuntut peningkatan kapasitas pemuda agar mampu beradaptasi dan bersaing secara positif di era modern.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat program pemberdayaan pemuda melalui ;

1. Peningkatan pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan pemuda
2. Perluasan akses terhadap pendidikan, olahraga, dan kegiatan kreatif
3. Mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah
4. Memperkuat pembinaan organisasi kepemudaan
5. Meningkatkan kolaborasi lintas sektor guna menciptakan pemuda yang mandiri, inovatif, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Upaya untuk mewujudkan Tujuan 3 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif terdapat 11 sasaran, 23 indikator kinerja, 52 program dengan alokasi anggaran Rp. 120.742.496.048,- terealisasi Rp. 115.472.068.980,- (95,63%).

3,1,5. Tujuan 5 Terwujudnya Masyarakat Yang Harmonis

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Harmoni	Indeks	NA	5,50	-	-	6,50	

Target **Indeks Harmoni** ditetapkan sebesar 5,50 dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 6,50. Namun demikian, capaian indikator tahun 2025 belum tersedia sehingga persentase capaian dan perbandingan terhadap target akhir RPJMD belum dapat dihitung.

Belum tersedianya capaian indikator tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, antara lain :

1. Belum optimalnya sistem pengukuran dan pengumpulan data terkait
2. Tingkat harmoni sosial masyarakat, keterbatasan pelaksanaan survei secara berkala



3. Perlunya penyempurnaan metode evaluasi indikator agar hasil pengukuran lebih akurat dan representatif
4. Dinamika sosial masyarakat, perbedaan latar belakang sosial dan budaya, serta pengaruh perkembangan informasi
5. Media sosial juga menjadi tantangan dalam menjaga dan mengukur tingkat harmoni sosial di daerah.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat upaya pembinaan kerukunan dan harmoni sosial melalui :

1. Peningkatan dialog antar masyarakat
2. Penguatan nilai toleransi dan kebersamaan
3. Peningkatan peran tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga stabilitas sosial
4. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi sosial masyarakat
5. Meningkatkan edukasi terkait kehidupan bermasyarakat yang harmonis
6. Mendorong partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan inklusif secara berkelanjutan.

Sasaran 23 Terwujudnya Kemaslahatan Beragama dan Pemajuan Kebudayaan

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	76,47	84,00	76,47*	91,04	85,00	89,96
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	20,00	30,00	20,00*	66,67	70,00	28,57

Capaian **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)** tercatat sebesar 76,47 dari target yang ditetapkan sebesar 84,00 atau mencapai 91,04 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 85,00, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 89,96 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kerukunan umat beragama di Kabupaten Bima berada pada kategori cukup baik dan tetap terjaga secara kondusif.



Sementara itu, **capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)** pada tahun 2025 tercatat sebesar 20,00 dari target sebesar 30,00 atau mencapai 66,67 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 70,00, maka capaian tahun 2025 baru mencapai 28,57 persen dari target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pelestarian kebudayaan daerah masih memerlukan perhatian dan penguatan yang lebih optimal agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

Sasaran Terwujudnya Kemaslahatan Beragama dan Pemajuan Kebudayaan didukung oleh 4 program meliputi : Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Program Pengembangan Kebudayaan, Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 13.217.782.470,- dengan realisasi sebesar Rp 12.879.287.805,- dengan serapan anggaran sebesar 97,44%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Masih terbatasnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya lokal
2. Keterbatasan sarana dan kegiatan pengembangan kebudayaan
3. Belum optimalnya dokumentasi dan promosi warisan budaya daerah
4. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi lokal
5. Aspek kerukunan umat beragama, tantangan yang dihadapi antara lain perlunya peningkatan komunikasi dan penguatan toleransi antar kelompok masyarakat guna menjaga stabilitas sosial yang harmonis.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat pembinaan kerukunan umat beragama melalui:

1. Dialog antarumat beragama, peningkatan toleransi, dan penguatan peran tokoh agama serta masyarakat dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis
2. Pemerintah daerah juga akan mendorong pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah melalui penyelenggaraan kegiatan budaya



3. Penguatan pendidikan budaya lokal, dokumentasi warisan budaya, serta peningkatan promosi budaya daerah guna memperkuat identitas dan karakter masyarakat Kabupaten Bima secara berkelanjutan.

Sasaran 24 Terwujudnya Keamanan Daerah

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Kriminalitas	Indeks	75,43	75,00	75,43 *	100,57	60,00	125,72

Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif sebagai fondasi penting dalam mendukung pembangunan dan aktivitas masyarakat. Pada tahun 2025, **capaian Indeks Kriminalitas** tercatat sebesar 75,43 dari target yang ditetapkan sebesar 75,00 atau mencapai 100,57 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 60,00, maka capaian tahun 2025 berada pada angka 125,72 persen terhadap target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas di Kabupaten Bima masih relatif tinggi dibandingkan kondisi yang diharapkan sehingga memerlukan upaya penanganan yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah bersama aparat keamanan antara lain melalui peningkatan koordinasi penegakan hukum, penguatan patroli dan pengawasan wilayah rawan, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui kegiatan siskamling dan forum kemitraan masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong program pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, pembinaan generasi muda, serta sosialisasi dan edukasi kesadaran hukum guna menekan potensi tindak kriminalitas secara berkelanjutan.

Sasaran Terwujudnya Keamanan Daerah didukung oleh 2 program meliputi : Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 1.921.805.750,- dengan realisasi sebesar Rp 1.383.019.040,- dengan serapan anggaran sebesar 71,96%.



Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Masih adanya faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang dapat memicu tindak kriminalitas
2. Rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat, serta keterbatasan pengawasan dan pengendalian keamanan pada beberapa wilayah
3. Pengaruh penyalahgunaan teknologi informasi, pergaulan sosial yang kurang kondusif, dan keterbatasan sarana pendukung keamanan juga turut menjadi tantangan dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus berupaya melalui :

1. Memperkuat koordinasi dengan aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Pemerintah daerah juga akan meningkatkan edukasi dan kesadaran hukum masyarakat
3. Memperkuat pembinaan sosial dan kepemudaan
4. Serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan
5. Peningkatan sistem pengawasan, penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, dan pengembangan program pencegahan kriminalitas akan terus dilakukan guna menciptakan kondisi daerah yang lebih aman, nyaman, dan kondusif secara berkelanjutan.

3,1,6. Tujuan 6 Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	69,73	74,68	69,72	93,36	75,5	92,34

Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tercatat sebesar 69,72 dari target yang ditetapkan sebesar 74,68 atau mencapai 93,36 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 75,5, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 92,34 persen dari target akhir



RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bima relatif baik, meskipun masih diperlukan berbagai upaya peningkatan dan pengendalian lingkungan secara lebih optimal.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Masih adanya pencemaran lingkungan akibat aktivitas domestik dan usaha masyarakat
2. Pengelolaan sampah yang belum optimal, serta keterbatasan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan
3. Kerusakan lahan, berkurangnya tutupan vegetasi
4. Dampak perubahan iklim dan bencana alam juga turut memengaruhi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bima.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat pengelolaan lingkungan hidup melalui :

1. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pencemaran
2. Penguatan pengelolaan sampah dan sanitasi lingkungan
3. Pelaksanaan program rehabilitasi dan pelestarian lingkungan
4. Meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan, memperkuat koordinasi lintas sektor
5. Mendorong penerapan pembangunan yang ramah lingkungan guna mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Sasaran 25 Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Lahan

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Kualitas Air	Indeks	47,78	75,34	47,78*	63,42	76,14	62,75
Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,69	95,10	93,69*	98,52	96,30	97,29
Indeks Kualitas Lahan	Indeks	63,11	72,78	63,11*	86,72	73,06	86,38

Capaian Indeks Kualitas Air tercatat sebesar 47,78 dari target yang ditetapkan sebesar 75,34 atau mencapai 63,42 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 76,14, maka capaian tahun



2025 baru mencapai 62,75 persen dari target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas air di Kabupaten Bima masih memerlukan perhatian dan pengelolaan yang lebih optimal untuk mengurangi tingkat pencemaran dan menjaga keberlanjutan sumber daya air.

Sementara itu, **Indeks Kualitas Udara** pada tahun 2025 mencapai 93,69 dari target sebesar 95,10 atau mencapai 98,52 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 96,30, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 97,29 persen dari target akhir RPJMD. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi kualitas udara di Kabupaten Bima masih berada pada kategori baik dan relatif terjaga. **Adapun Indeks Kualitas Lahan** tercatat sebesar 63,11 dari target 72,78 atau mencapai 86,72 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 73,06, maka capaian tahun 2025 telah mencapai 86,38 persen dari target akhir RPJMD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas lahan masih perlu terus ditingkatkan guna mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam.

Sasaran Meningkatnya Kualitas Air, Udara, Dan Lahan didukung oleh 4 program meliputi : Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Pengelolaan Persampahan. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 5.759.605.545,- dengan realisasi sebesar Rp 5.299.754.419,- dengan serapan anggaran sebesar 92,02%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Masih adanya pencemaran air akibat limbah domestik dan aktivitas usaha masyarakat
2. Pengelolaan sampah dan sanitasi yang belum optimal
3. Kerusakan lahan akibat alih fungsi lahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang belum terkendali



4. Faktor perubahan iklim, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan
5. Keterbatasan sarana pengelolaan lingkungan juga turut memengaruhi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bima.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat pengelolaan lingkungan melalui :

1. Peningkatan pengawasan terhadap pencemaran lingkungan, penguatan pengelolaan sampah dan sanitasi
2. Pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi sumber daya alam
3. Meningkatkan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat koordinasi lintas sektor
4. Mendorong penerapan pembangunan yang ramah lingkungan guna meningkatkan kualitas air, udara, dan lahan secara berkelanjutan di Kabupaten Bima.

Sasaran 26 Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Indikator	Satuan	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	% Capaian	Target Akhir RPJMD 2029	% Perbandingan Capaian 2025 dengan Target akhir RPJMD 2029
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	135,17	132,86	194,28	146,22	123,64	157,13
Persentase Penurunan Emisi GRK:							
(a) Kumulatif	%	NA	2,15	-	-	3,57	-
(b) Tahunan	%	NA	19,83	-	-	33,82	-

Capaian Indeks Risiko Bencana (IRB) tercatat sebesar 194,28 dari target yang ditetapkan sebesar 132,86 atau mencapai 146,22 persen. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 123,64, maka capaian tahun 2025 berada pada angka 157,13 persen terhadap target akhir RPJMD. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat risiko bencana di Kabupaten Bima masih relatif tinggi dan memerlukan penanganan yang lebih intensif serta terpadu.

Sementara itu, **indikator Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**, baik secara kumulatif maupun tahunan, pada tahun 2025 belum



tersedia sehingga capaian dan persentase perbandingan terhadap target akhir RPJMD belum dapat dihitung. Adapun target penurunan emisi GRK kumulatif tahun 2025 ditetapkan sebesar 2,15 persen dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 3,57 persen, sedangkan target penurunan emisi GRK tahunan sebesar 19,83 persen dengan target akhir RPJMD tahun 2029 sebesar 33,82 persen.

Sasaran Terwujudnya Keamanan Daerah didukung oleh Program Penanggulangan Bencana. Pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.076.066.000,- dengan realisasi sebesar Rp 1.910.742.746,- dengan serapan anggaran sebesar 92,04%.

Beberapa kendala yang memengaruhi capaian indikator tersebut antara lain :

1. Tingginya potensi bencana alam akibat kondisi geografis dan perubahan iklim
2. Keterbatasan infrastruktur dan sarana mitigasi bencana
3. Masih perlunya peningkatan kapasitas masyarakat dalam kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
4. Aspek pengendalian emisi GRK, masih terdapat keterbatasan data dan sistem inventarisasi emisi, rendahnya penerapan pembangunan rendah karbon
5. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan dan energi ramah lingkungan di berbagai sektor pembangunan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus memperkuat upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana melalui :

1. Peningkatan sistem peringatan dini, penguatan kapasitas penanggulangan bencana
2. Peningkatan edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana
3. Mendorong penguatan pengelolaan lingkungan hidup, rehabilitasi kawasan rawan bencana, serta penerapan pembangunan rendah karbon



dan ramah lingkungan guna mendukung penurunan emisi GRK secara berkelanjutan

Penguatan sistem data dan monitoring emisi GRK akan terus dilakukan untuk mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang lebih berkelanjutan di Kabupaten Bima.

1.2. REALISASI ANGGARAN

Total anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 sebesar **508.388.790.355,-** dengan realisasi anggaran mencapai Rp **432.880.769.595,-** atau sebesar **85,15** persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah secara umum telah berjalan cukup baik dan sebagian besar anggaran yang dialokasikan telah dapat direalisasikan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Meskipun demikian, masih terdapat selisih anggaran yang belum terealisasi secara optimal. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan, proses administrasi dan pengadaan barang/jasa, efisiensi belanja pada beberapa program, serta adanya kegiatan yang pelaksanaannya belum sepenuhnya selesai pada tahun anggaran berjalan. Selain itu, dinamika kebijakan dan kondisi lapangan juga turut memengaruhi kecepatan realisasi anggaran pada beberapa sektor pembangunan.

Ke depan, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran melalui penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, percepatan proses administrasi dan pengadaan, serta peningkatan koordinasi antar perangkat daerah. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran diharapkan dapat semakin optimal guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.



Adapun alokasi dan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bima
Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	%
Tujuan 1 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Dan Akuntabel, Serta Berdaya Saing Untuk Mencapai Pelayanan Publik Prima						
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Indeks Reformasi Birokrasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	38.048.000	38.153.000	100
		2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	41.425.000	35.931.000	86,74
		3 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.632.821.122	18.408.748.965	98,8
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	83.908.000	83.634.000	99,67
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.698.000	49.533.450	99,67
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	41.616.000	41.562.000	99,87
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	28.070.000	27.645.000	98,49
2	Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	4 Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Program Kepegawaian Daerah	1.565.380.000	1.209.421.568	77,26
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.553.461.400	1.385.098.420	89,16
3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	5 Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	29.710.000	29.329.000	89,16
			Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.921.858.500	1.489.326.736	77,49
			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	169.523.000	169.523.000	100
			Program Pendaftaran Penduduk	.024.989.000	.021.024.304	99,61
			Program Pencatatan Sipil	78.991.000	75.038.600	95



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	%
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	111.942.000	103.972.200	92,88
			Program Pengelolaan Profil Kependudukan	148.604.000	148.576.000	99,98
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	28.538.498.036	20.161.376.578	70,65
			Program Pelayanan Penanaman Modal	389.632.500	387.867.000	99,55
Tujuan 2 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia						
4	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6 Indeks Pembangunan Manusia	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	90.668.189.963	88.433.325.426	97,54
		7 Usia Harapan Hidup (UHH)	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.340.805.761	1.276.919.800	95,24
		8 Prevalensi Stunting	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	582.404.500	540.532.500	92,81
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	432.459.800	419.759.573	97,06
5	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	9 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Program Pengelolaan Pendidikan	159.080.591.074	105.675.652.606	66,43
		10 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Program Pengembangan Kurikulum	53.700.000	52.700.000	98,14
		11 Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	47.000.000	45.350.000	96,49
		a) Literasi Membaca				
		b) Numerasi				
6	Meningkatnya Literasi Masyarakat	12 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Program Pembinaan Perpustakaan	237.274.500	204.432.000	86,16
		13 Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	611.190.200	595.788.500	97,48



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	%
7	Meningkatnya Kesenjangan Gender dan Perlindungan Anak, Serta Kualitas Keluarga	14 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	710.630.000	699.596.800	98,45
		15 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Program Perlindungan Perempuan	2.087.278.000	1.953.016.477	93,57
		16 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Program Perlindungan Khusus Anak	331.810.000	228.182.625	68,77
			Program Pengendalian Penduduk	468.000.000	465.899.000	99,55
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.912.823.000	6.826.261.000	98,75
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2.958.639.000	2.923.974.500	98,83
8	Terwujudnya Perlindungan Sosial Yang Adaptif	17 Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Program Pemberdayaan Sosial	149.836.250	147.077.750	98,16
			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	71.545.500	66.481.574	92,92
			Program Rehabilitasi Sosial	692.685.000	690.288.284	99,65
Tujuan 3 Meningkatkan Infrastruktur yang Merata dan Berkeadilan						
9	Meningkatnya Akses dan Kualitas Infrastruktur Wilayah	18 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	10.070.826.378	9.640.828.930	95,73
		19 Rasio Konektivitas	Program Pengelolaan Pelayaran	153.478.500	131.641.000	85,77
		20 Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	48.286.639.706	44.147.474.209	91,43
		21 Rasio Permukiman Layak Huni	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	7.732.880.000	7.551.076.300	97,65
			Program Penataan Bangunan Gedung	5.140.058.178	4.858.116.840	94,51
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	9.544.017.848	9.442.941.048	98,94
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.454.137.500	15.191.820.800	92,33
			Program Kawasan Permukiman	2.656.206.400	2.638.943.000	99,35
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	477.100.000	468.100.000	98,11



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	%
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	8.585.781.500	8.564.387.656	99,75
Tujuan 4 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Inklusif						
10	Meningkatkannya Peran Sektor Pertanian Dan Perikanan Dalam Perekonomian Serta Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dan Nelayan	22 Pertumbuhan Ekonomi	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.674.871.000	1.651.410.000	98,6
		23 Kontribusi PDRB Kabupaten Bima terhadap Provinsi	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	33.399.873.539	32.950.980.645	98,66
		24 PDRB per kapita	Program Penyuluhan Pertanian	1.788.609.000	1.650.794.400	92,29
		25 Rasio Gini	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	3.377.620.460	3.359.759.200	99,47
		26 Tingkat Kemiskinan	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	184.433.250	183.199.050	99,33
		27 Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	704.235.050	701.022.250	99,54
		28 Nilai Tukar Petani (NTP)	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	878.689.500	869.340.314	98,94
		29 Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	59.874.000	56.408.450	94,21
			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	408.134.000	404.074.600	99,01
11	Meningkatnya Peran Industri Pengolahan Pada Perekonomian Daerah	30 Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.247.393.600	1.101.909.683	88,34
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	8.040.000	7.914.000	98,43
12	Meningkatnya Peran Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian	31 Meningkatkan peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	8.850.500	8.754.500	98,92
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	894.327.300	881.461.974	98,56
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	178.608.400	176.598.000	98,87
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	12.595.000	12.298.000	97,64



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	%
13	Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada Perekonomian Daerah	33 Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30.643.000	30.061.246	98,1
		34 Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	14.218.100	14.201.500	99,88
			Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	150.702.500	150.184.158	99,66
14	Meningkatnya Daya Saing Sektor Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	35 Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	105.369.950	105.233.500	99,87
		36 Nilai tambah Ekonomi Kreatif	Program Pemasaran Pariwisata	1.324.223.500	1.322.661.200	99,88
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	332.749.600	321.616.600	96,65
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	4.342.500	4.337.500	99,88
15	Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	37 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.634.251.700	1.574.951.518	96,37
16	Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	38 Tingkat Inflasi				
17	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	39 Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.804.674.800	1.240.183.362	68,72
18	Meningkatnya Nilai Investasi Daerah	40 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	62.847.500	62.244.860	99,04
		41 Persentase peningkatan nilai investasi	Program Promosi Penanaman Modal	136.628.000	136.131.214	99,64
			Program Pelayanan Penanaman Modal	194.816.250	193.933.500	99,55
19	Meningkatnya Kesempatan Kerja	42 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	754.538.500	704.662.400	93,39
			Program Penempatan Tenaga Kerja	891.934.950	787.858.800	88,33



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	%
20	Terwujudnya Ketahanan Pangan	43 Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	703.263.500	668.730.186	95,09
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	256.843.500	255.962.000	99,66
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	13.470.000	13.469.000	99,99
21	Meningkatnya kemandirian desa	44 Indeks Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	41.775.000	41.739.000	99,91
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	748.238.025	712.331.860	95,2
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	770.820.000	770.602.400	99,97
22	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Daerah	45 Indeks Pembangunan Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	649.850.000	555.640.000	85,5
Tujuan 5 Terwujudnya Masyarakat Yang Harmonis						
23	Terwujudnya kemaslahatan beragama dan kemajuan kebudayaan	46 Indeks Harmoni	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	11.675.851.470	11.568.651.305	99,08
		47 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Program Pengembangan Kebudayaan	116.450.000	112.420.500	96,54
		48 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	136.700.000	133.570.000	97,71
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.288.781.000	1.064.646.000	82,61
24	Terwujudnya Keamanan Daerah	49 Indeks Kriminalitas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.124.722.700	610.854.600	54,31
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	797.083.050	772.164.440	96,87
Tujuan 6 Terwujudnya Lingkungan Hidup Yang Berkualitas						
25	Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	50 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.238.110.000	1.214.186.880	98,07
		51 Indeks Kualitas Air	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	564.632.100	546.179.170	96,73



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Program dan Kegiatan	Jumlah Pagu Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	%
		52 Indeks Kualitas Udara	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	63.936.000	62.178.440	97,25
		53 Indeks Kualitas Lahan	Program Pengelolaan Persampahan	3.892.927.445	3.477.209.929	89,32
26	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	54 Indeks Risiko Bencana (IRB)	Program Penanggulangan Bencana	2.076.066.000	1.910.742.746	92,04
		55 Persentase Penurunan Emisi GRK:				
		(a) Kumulatif				
		(b) Tahunan				
			Total Anggaran	508.388.790.355	432.880.769.595	85,15



BAB IV PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Secara umum, kinerja pembangunan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun 2025 menunjukkan hasil yang cukup baik pada berbagai sektor strategis. Hal ini tercermin dari capaian sejumlah indikator yang telah melampaui target tahunan, terutama pada bidang pelayanan publik, pembangunan manusia, profesionalitas ASN, ketahanan pangan, serta sektor pertanian dan perikanan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan pembangunan daerah telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah indikator yang belum mencapai target secara optimal, khususnya pada sektor ekonomi, industri pengolahan, UMKM, perdagangan, investasi, serta penurunan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, tantangan pada bidang kesehatan (stunting), pendidikan (numerasi), lingkungan hidup, serta risiko bencana masih memerlukan perhatian serius. Secara keseluruhan, capaian kinerja pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2025 menunjukkan bahwa arah pembangunan sudah berada pada jalur yang tepat, namun masih memerlukan percepatan dan penguatan di berbagai sektor strategis untuk mencapai target RPJMD Tahun 2029.

4.2. HAMBATAN PEMBANGUNAN

Pelaksanaan pembangunan daerah masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi pencapaian indikator kinerja, antara lain:

1. Struktur ekonomi yang belum kuat dan berimbang, ditandai dengan masih dominannya sektor primer serta rendahnya nilai tambah sektor industri, UMKM, dan perdagangan.



2. Keterbatasan kualitas SDM dan ketenagakerjaan, termasuk kesenjangan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar serta penciptaan lapangan kerja yang belum optimal.
3. Masih tingginya permasalahan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, stunting, dan ketimpangan pendapatan.
4. Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas wilayah, yang belum sepenuhnya mendukung aktivitas ekonomi dan pelayanan publik secara merata.
5. Tantangan lingkungan hidup dan risiko bencana, termasuk kualitas air yang masih rendah serta tingginya tingkat kerawanan bencana.
6. Belum optimalnya pengembangan UMKM dan investasi, termasuk akses permodalan, pemasaran, dan digitalisasi usaha.
7. Keterbatasan data dan sistem pengukuran indikator, pada beberapa indikator strategis yang belum tersedia atau belum sepenuhnya terintegrasi.

4.3. UPAYA PERBAIKAN

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut dan mempercepat pencapaian target RPJMD Tahun 2029, Pemerintah Kabupaten Bima akan melakukan upaya perbaikan sebagai berikut:

1. Transformasi dan diversifikasi ekonomi daerah
 - Mendorong hilirisasi sektor pertanian dan perikanan.
 - Mengembangkan industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
 - Mengurangi ketergantungan pada sektor primer.
2. Peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja
 - Penyederhanaan perizinan dan peningkatan iklim investasi.
 - Pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi lokal.
 - Penguatan kemitraan dengan dunia usaha.
3. Penguatan UMKM dan koperasi
 - Peningkatan akses permodalan dan pembiayaan usaha.
 - Pelatihan manajemen, pemasaran, dan digitalisasi usaha.
 - Penguatan kelembagaan dan perluasan akses pasar.



4. Percepatan penurunan kemiskinan dan stunting
 - Intervensi lintas sektor secara terpadu.
 - Penguatan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
 - Peningkatan kualitas layanan kesehatan, gizi, dan sanitasi.
5. Peningkatan kualitas SDM
 - Penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja.
 - Peningkatan literasi, numerasi, dan mutu pendidikan.
 - Pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan.
6. Percepatan pembangunan infrastruktur
 - Peningkatan konektivitas wilayah dan kualitas jalan.
 - Penguatan infrastruktur dasar di desa dan permukiman.
 - Pemerataan pembangunan antarwilayah.
7. Penguatan lingkungan hidup dan mitigasi bencana
 - Rehabilitasi lingkungan dan pengendalian pencemaran.
 - Penguatan sistem kesiapsiagaan bencana.
 - Penerapan pembangunan rendah karbon.
8. Penguatan tata kelola pemerintahan
 - Digitalisasi layanan publik dan penguatan data pembangunan.
 - Peningkatan akuntabilitas kinerja (SAKIP) dan reformasi birokrasi.
 - Penguatan monitoring dan evaluasi berbasis kinerja.

4.4. PENUTUP

Dengan berbagai capaian, tantangan, dan upaya perbaikan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bima berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan daerah secara berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Diperlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, maupun lembaga lainnya, agar target pembangunan dalam RPJMD Tahun 2029 dapat tercapai secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bima.

LAMPIRAN : I

PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ADY MAHYUDI

Jabatan : Bupati Bima

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bima, Maret 2025

BUPATI BIMA,

ADY MAHYUDI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	
VISI 1 BIMA BERMARTABAT YANG BERKEMAJUAN, MAKMUR, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil					
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik prima		Indeks Reformasi Birokrasi	B (60-70)	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	70-80 (BB)	
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	77,00-78,00	
		Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	76,50	
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3-4	
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing					
2.	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia	71,00	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,25	
			Prevalensi Stunting	30,7	
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,56	
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	14,12	
			Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			a) Literasi Membaca	53,96	
			b) Numerasi	31,74	
			Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	30-49,9
				Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	43,11
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.439	
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	50-60	

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
		anak, serta kualitas keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	62,23
		Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	56.73
Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui penegakan tata ruang yang berkelanjutan				
3.	Meningkatnya Infrastruktur yang merata dan berkeadilan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	2,49
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio Konektivitas	0.49
			Tingkat Kemantapan Jalan	54.71
			Rasio Permukiman Layak Huni	0.735
Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan				
4.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	5,63-6,05
			Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi	9,47
			PDRB per kapita	32,75
			Rasio Gini	0,344
			Tingkat Kemiskinan	12,18 - 12,08
		Meningkatnya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	40.00
			Nilai Tukar Petani (NTP)	124.31
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	107.59
		Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	3.06-3.08
		Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	7.54
		Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	0.57
			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	0.57
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	0,45
			Nilai tambah Ekonomi Kreatif	511,90

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025
		Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	3.90
		Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi	2,8 - 3,5
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	9.10
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	38,02
			Persentase peningkatan nilai investasi	55.5
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2.04-1.99
		Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79
		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	66.56
		Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	54
Misi 5 : Membangun Kapasitas Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya				
5.	Terwujudnya masyarakat yang Harmonis		Indeks Harmoni	5,5 – 6,5
		Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	94.00
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	20,01 – 40,00
		Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas	75,00
6.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,01
		Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air	20,8
			Indeks Kualitas Udara	40,019
			Indeks Kualitas Lahan	8,23
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	97,76
			Persentase Penurunan Emisi GRK:	
			(a) Kumulatif	2,15
			(b) Tahunan	19,83

Program		Anggaran	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB			
1	BIDANG PENDIDIKAN		
	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp.	159.080.591.074,00
	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	53.700.000,00
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	47.000.000,00
2	BIDANG KESEHATAN		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp.	90.668.189.963,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	1.340.805.761,00
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	582.404.500,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp.	432.459.800,00
3	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp.	13.574.021.600,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	16.454.137.500,00
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp.	9.544.017.848,00
	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp.	5.140.058.178,00
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp.	7.732.880.000,00
	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp.	48.286.639.706,00
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp.	48.576.500,00
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp.	786.172.800,00
4	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	Program Kawasan Permukiman	Rp.	2.656.206.400,00
	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	477.100.000,00
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp.	8.585.781.500,00
5	BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp.	1.124.722.700,00
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	797.083.050,00
	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	2.076.066.000,00
6	BIDANG SOSIAL		
	Program Pemberdayaan Sosial	Rp.	149.836.250,00
	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	692.685.000,00
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	71.545.500,00
	Program Penanganan Bencana	Rp.	453.925.400,00
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	85.338.750,00
7	BIDANG TENAGA KERJA		
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	754.538.500,00
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	891.934.950,00
	Program Hubungan Industrial	Rp.	250.405.500,00

Program		Anggaran	
8	BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp.	710.630.000,00
	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	2.087.278.000,00
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp.	9.160.000,00
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp.	99.390.000,00
	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp.	331.810.000,00
9	BIDANG PANGAN		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp.	107.500.000,00
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	703.263.500,00
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	256.843.500,00
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp.	13.470.000,00
10	BIDANG PERTANAHAN		
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp.	58.633.000,00
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp.	709.813.000,00
	Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Rp.	45.734.000,00
11	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp.	295.762.000,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.238.110.000,00
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp.	564.632.100,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp.	63.936.000,00
	Program Pengelolaan Persampahan	Rp.	3.892.927.445,00
12	BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
	Program Pendaftaran Penduduk	Rp.	512.494.500,00
	Program Pencatatan Sipil	Rp.	39.495.500,00
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	55.971.000,00
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp.	74.302.000,00
13	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	Program Penataan Desa	Rp.	448.000.000,00
	Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Rp.	116.000.000,00
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	62.000.000,00
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	223.000.000,00
14	BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		
	Program Pengendalian Penduduk	Rp.	468.000.000,00
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	6.912.823.000,00
	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	2.958.639.000,00

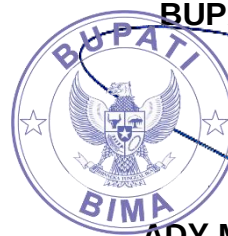
Program		Anggaran	
15	BIDANG PERHUBUNGAN		
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp.	10.070.826.378,00
	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.	153.478.500,00
16	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp.	960.929.250,00
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	611.190.200,00
17	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp.	4.502.500,00
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	30.643.000,00
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp.	14.218.100,00
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp.	150.702.500,00
	Program Pemberdayaan DAN Perlindungan Koperasi	Rp.	104.986.500,00
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp.	223.424.500,00
	Program Pengembangan UMKM	Rp.	13.157.500,00
18	BIDANG PENANAMAN MODAL		
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.	62.847.500,00
	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	136.628.000,00
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	194.816.250,00
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.	116.491.500,00
	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.	29.356.000,00
19	BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp.	649.850.000,00
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	1.871.704.200,00
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	100.000.000,00
20	BIDANG STATISTIK		
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp.	84.761.500,00
21	BIDANG PERSANDIAN		
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp.	64.776.500,00
22	BIDANG KEBUDAYAAN		
	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	116.450.000,00
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	1.288.781.000,00
	Program Pembinaan Sejarah	Rp.	70.000.000,00
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp.	136.700.000,00
	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp.	74.170.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
1	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	704.235.050,00
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	878.689.500,00
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp.	59.874.000,00

Program		Anggaran	
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp.	408.134.000,00
2	BIDANG PARIWISATA		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	105.369.950,00
	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	1.324.223.500,00
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp.	332.749.600,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp.	4.342.500,00
3	BIDANG PERTANIAN		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	1.674.871.000,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	33.399.873.539,00
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp.	101.987.000,00
	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	1.788.609.000,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	3.377.620.460,00
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	184.433.250,00
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	528.983.000,00
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp.	79.005.000,00
	Program Penyuluhan Pertanian	Rp.	13.440.000,00
4	BIDANG PERDAGANGAN		
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	8.850.500,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	894.327.300,00
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	178.608.400,00
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	12.595.000,00
	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	204.000.000,00
5	BIDANG PERINDUSTRIAN		
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	1.247.393.600,00
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	8.040.000,00
6	BIDANG TRANSMIGRASI		
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Rp.	432.433.000,00
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	42.688.408.636,00
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	11.675.851.470,00
	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	1.634.251.700,00
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
1	PERENCANAAN		

Program		Anggaran	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	840.871.900,00
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.267.240.300,00
2	KEUANGAN		
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	1.804.674.800,00
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	321.670.039.456,30
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	2.786.862.050,00
3	KEPEGAWAIAN		
	Program Kepegawaian Daerah	Rp.	782.690.000,00
	Pendidikan Dan Pelatihan	Rp.	776.730.700,00
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	776.730.700,00
	Penelitian Dan Pengembangan	Rp.	1.371.921.900,00
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp.	75.000.000,00
	Program Riset dan Inovasi Daerah	Rp.	149.134.500,00
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	4.197.940.106,00
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	938.685.164,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	2.723.089.868,00
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp.	442.762.000,00
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp.	947.545.000,00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp.	159.204.100,00
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp.	215.388.250,00

Bima, Maret 2025

BUPATI BIMA,



ADY MAHYUDI

LAMPIRAN II :

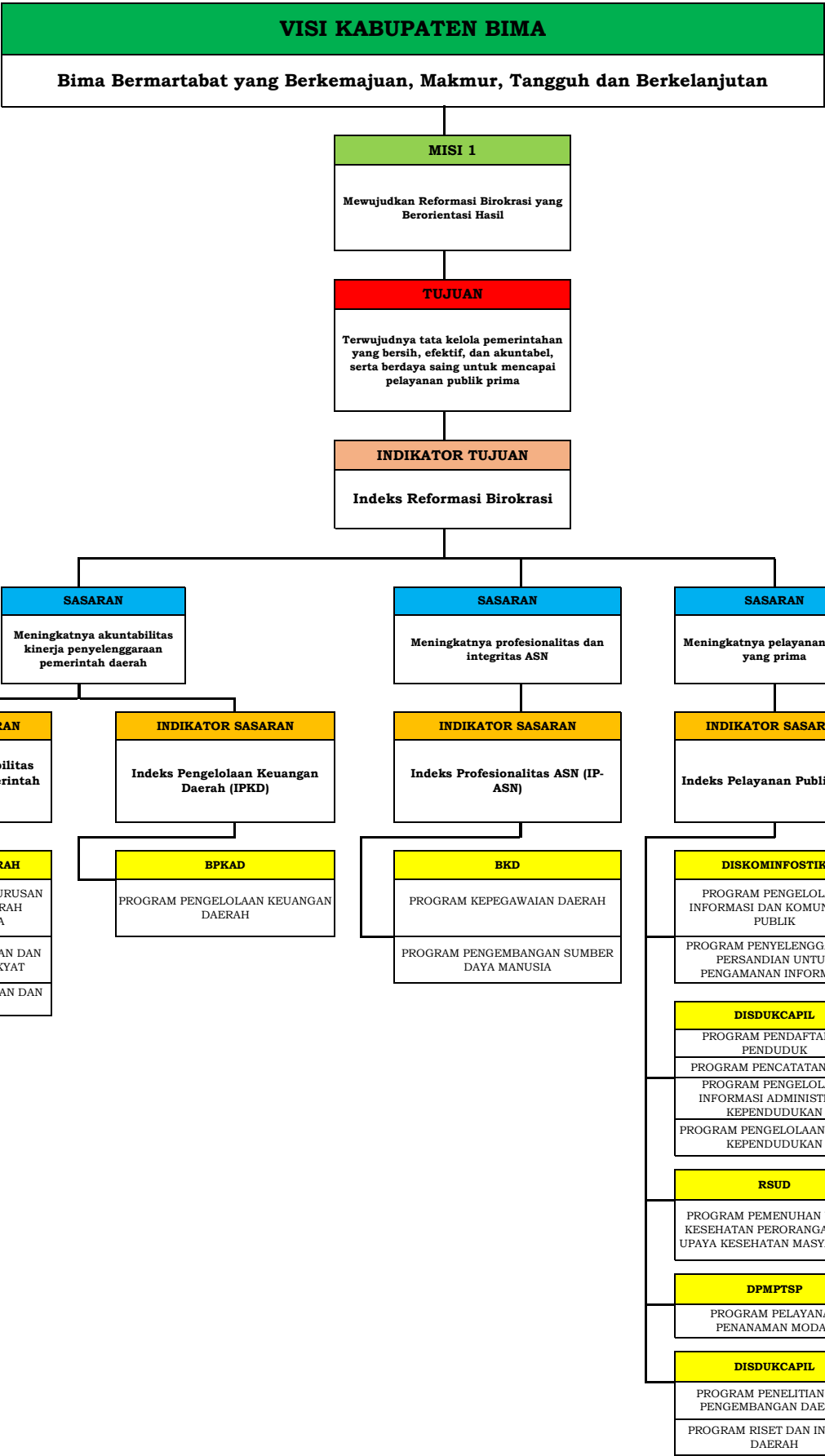
Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tahun 2025

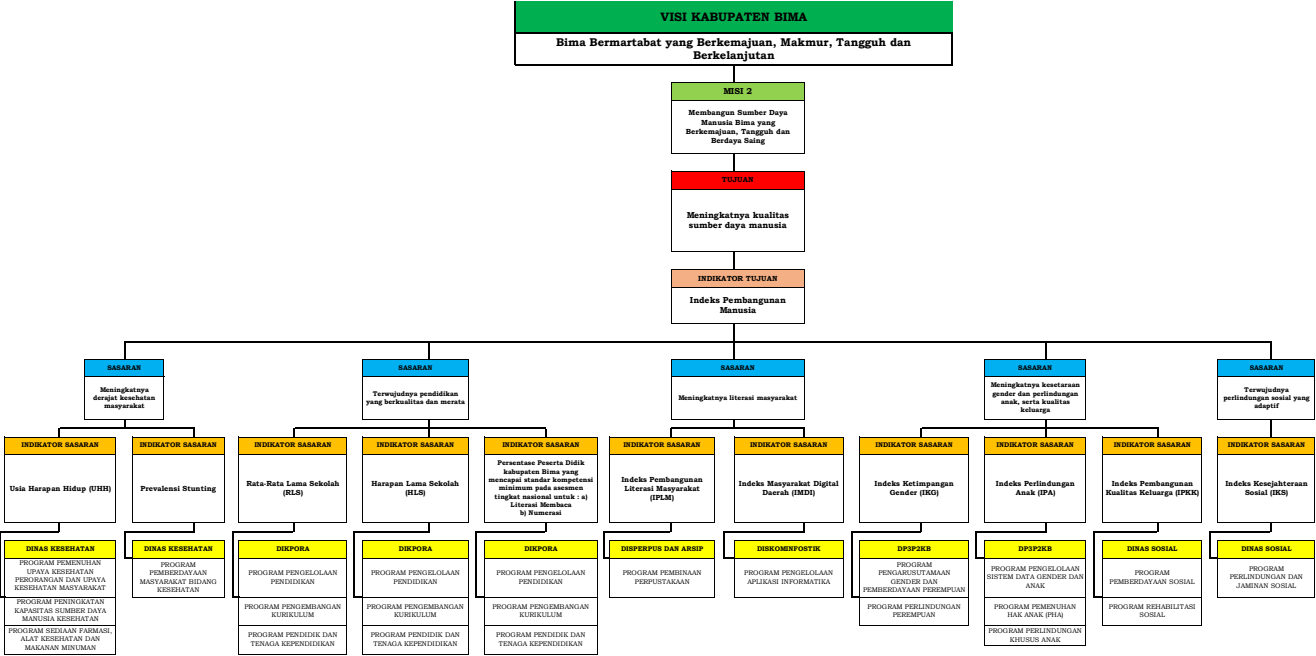
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	1. Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	65,29	93,27
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai/ Predikat	70	62,75	89,64
		3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Indeks	77	61,55	79,94
2	Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	4. Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Indeks	76,5	75,98	99,32
3.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	5. Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3	3,62	120,67
4.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6. Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71	71,97	101,37
		7. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,25	72,22	99,96
		8. Prevalensi Stunting	Persen	30,7	36,7	119,54
5.	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	9. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,56	8,61	100,58
		10. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	14,12	13,67	96,81
		11. Persentase Peserta Didik kabupaten Bima yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
		a) Literasi Membaca	Persen	53,96	52,32	96,96
		b) Numerasi	Persen	31,74	29,97	94,42
6	Meningkatnya literasi masyarakat	12. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	30-49,9	29,46*	98,2
		13. Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Indeks	43,11	42,54*	98,68
7.	Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	14. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.439	0,479	91,65
		15. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	50-60	44.46*	88,92
		16. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	62,23	60.7*	97,54
8	Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	17. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Indeks	56.73	46,16	81,37
9	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	18. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	2,49	NA	-
		19. Rasio Konektivitas	Nilai	0.49	-	-
		20. Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	54.71	53.11	97,08
		21. Rasio Permukiman Layak Huni	Nilai	0.735	0.732	99,59
		22. Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,63-6,05	3,12	55,42
10.	Meningkatnya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	23. Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi	Persen	9,47	8,12	85,74
		24. PDRB per kapita	Rp Juta	32,75	28,1	85,8
		25. Rasio Gini	Nilai	0,344	0,356	96,63
		26. Tingkat Kemiskinan	Persen	12,18 - 12,08	13,6	89,56
		27. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Persen	40	45,16	112,9
11.	Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	28. Nilai Tukar Petani (NTP)	Nilai	124,31	123,31	99,20
		29. Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai	107,59	105,59	98,14
		30. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Persen	30,8	2,76	8,96
12.	Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	31. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persen	7,54	2,76	36,60
13.	Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah	32. Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Persen	0.57	0.14	24,56
		33. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	Nilai	0.57	0.14	24,56
14.	Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	34. Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Persen	0,45	0,38*	84,44
		35. Nilai tambah Ekonomi Kreatif	Rp Milyar	511,9	420,982*	82,24
15	Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	36. Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Indeks	3.90	3,85*	98,72
16.	Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	37. Tingkat Inflasi	Persen	3,5	2,94	84
17.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	38. Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persen	9.10	8,13	89,34
18.	Meningkatnya nilai investasi daerah	39. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen PDRB	38,02	37,95	99,82
		40. Persentase peningkatan nilai investasi	Persen	55,50	49,87	89,37

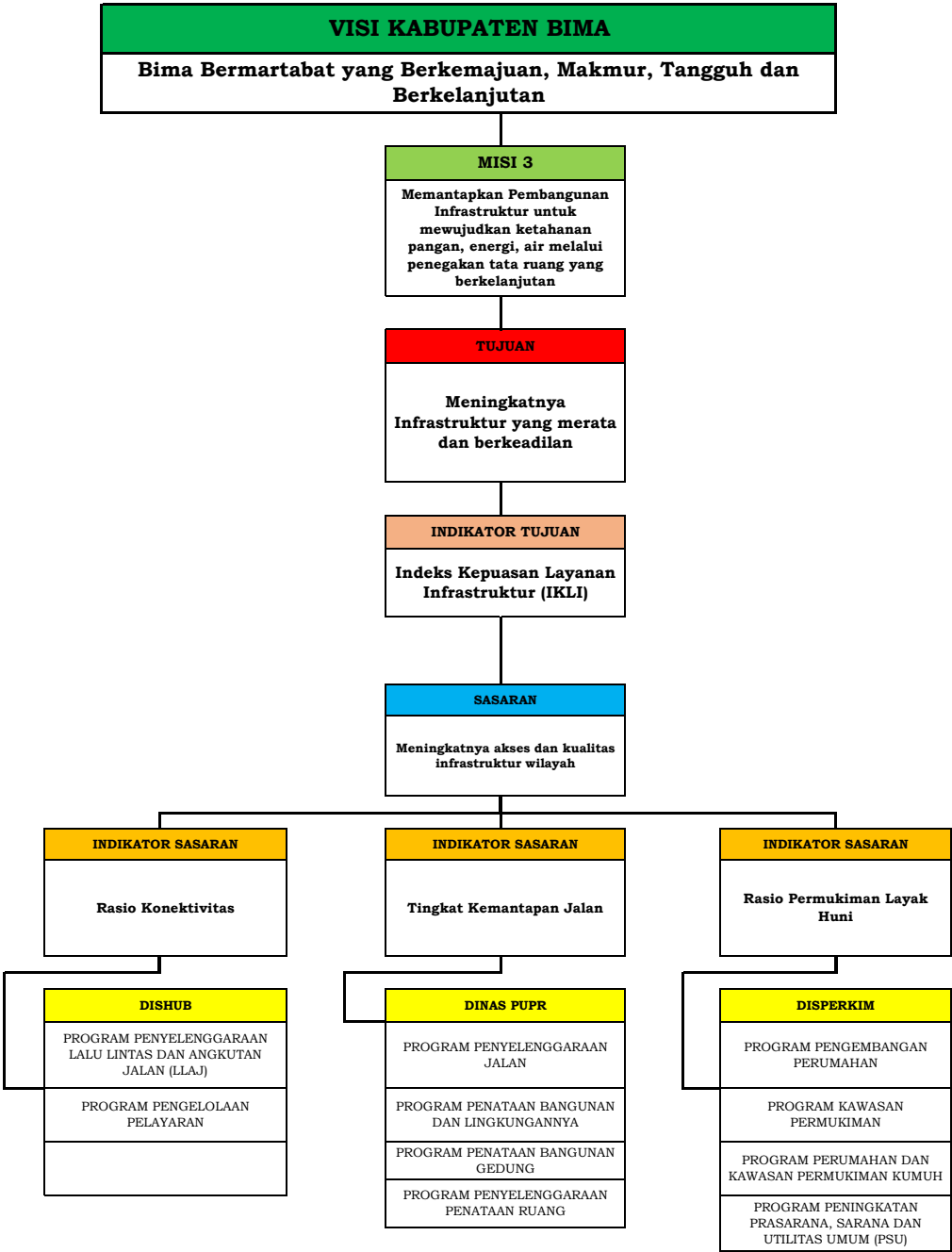
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
19.	Meningkatnya kesempatan kerja	41. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	2,04	2,15	105,39
20.	Terwujudnya ketahanan pangan	42. Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	79	78,26	99,06
21.	Meningkatnya kemandirian desa	43. Indeks Desa	Indeks	66,56	63,56	95,49
22.	Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	44. Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54	53,67*	99,39
		45. Indeks Harmoni	Indeks	5,5		
23.	Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	46. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	84	76,47*	91,04
		47. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	30	20,00*	66,67
24.	Terwujudnya keamanan daerah	48. Indeks Kriminalitas	Indeks	75	75,43 *	100,57
		49. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	74,68	69,72	93,36
25.	Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	50. Indeks Kualitas Air	Indeks	75,34	47,78*	63,42
		51. Indeks Kualitas Udara	Indeks	95,1	93,69*	98,52
		52. Indeks Kualitas Lahan	Indeks	72,78	63,11*	86,72
		53. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	132,86	194,28	146,22
26.	Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	54. Persentase Penurunan Emisi GRK:				
		(a) Kumulatif	Persen	2,15	-	-
		(b) Tahunan	Persen	19,83	-	-

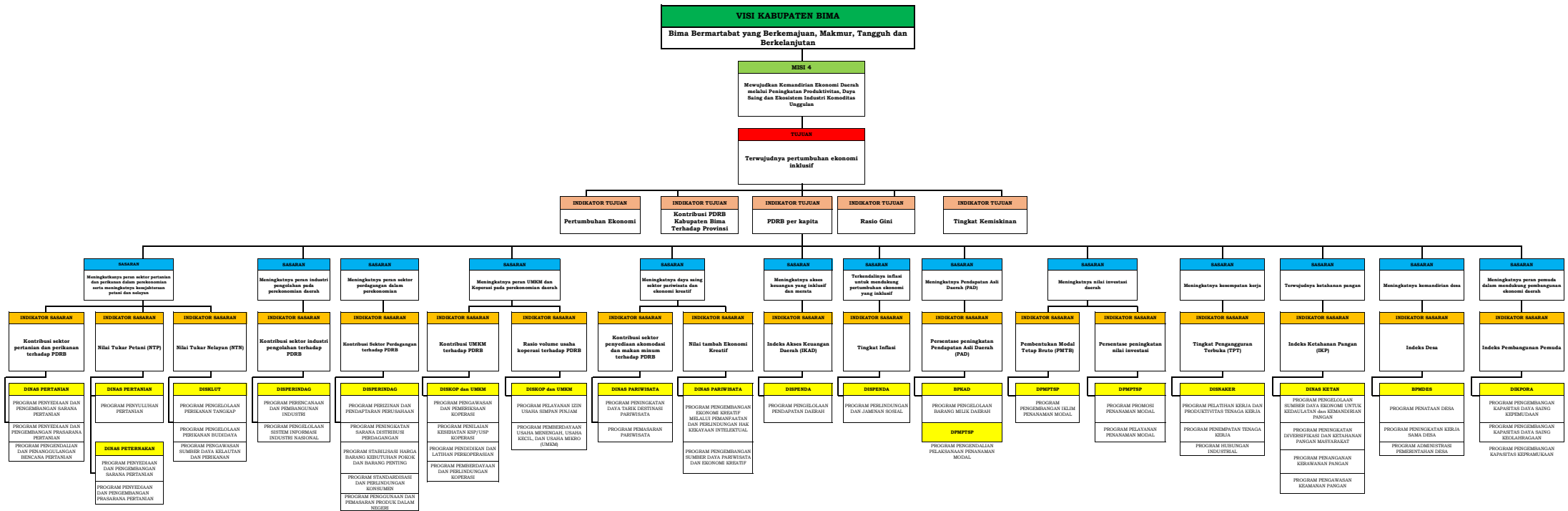
LAMPIRAN III : CASCADE

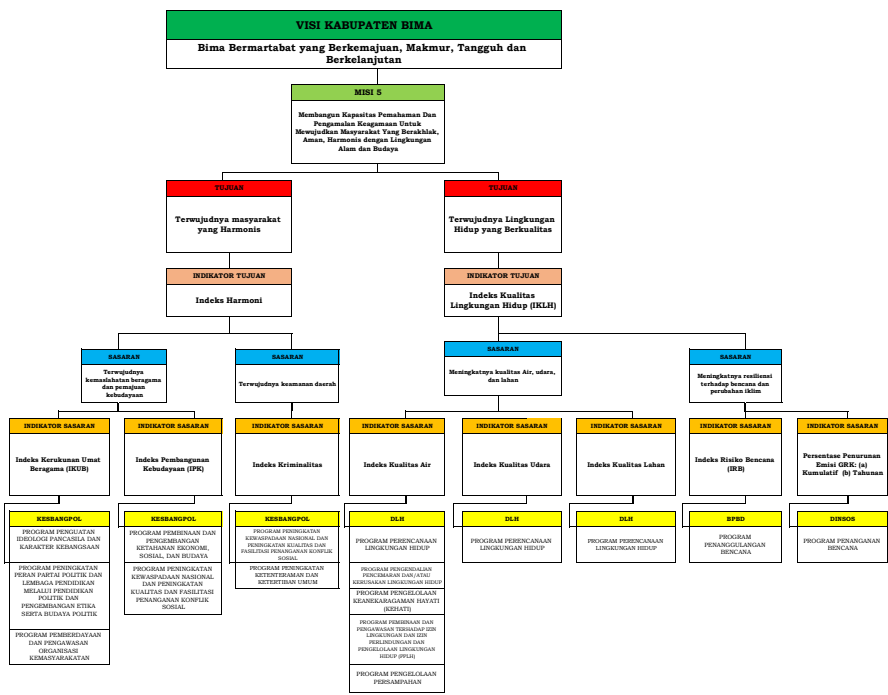
CASCADE KABUPATEN BIMA



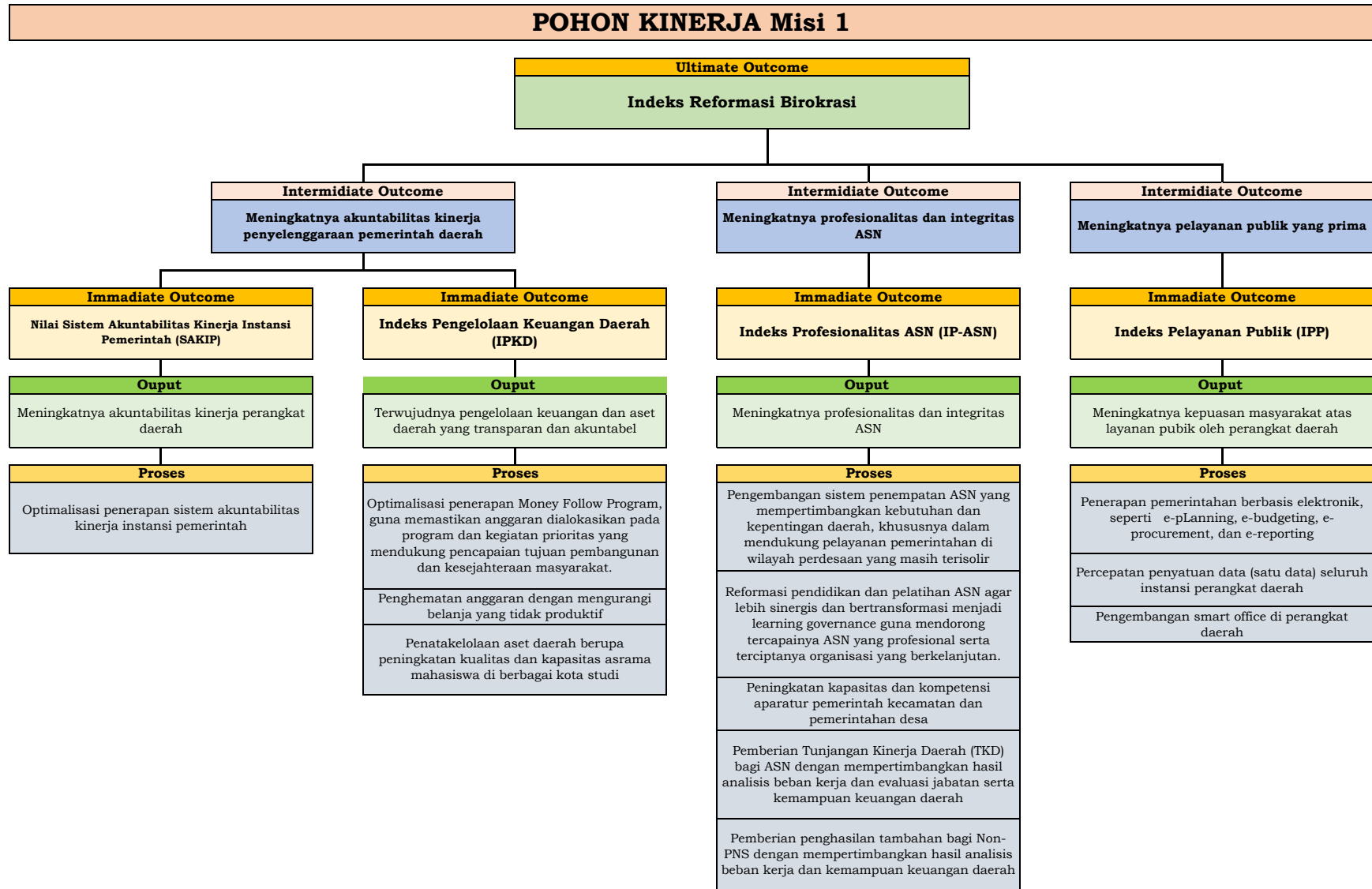


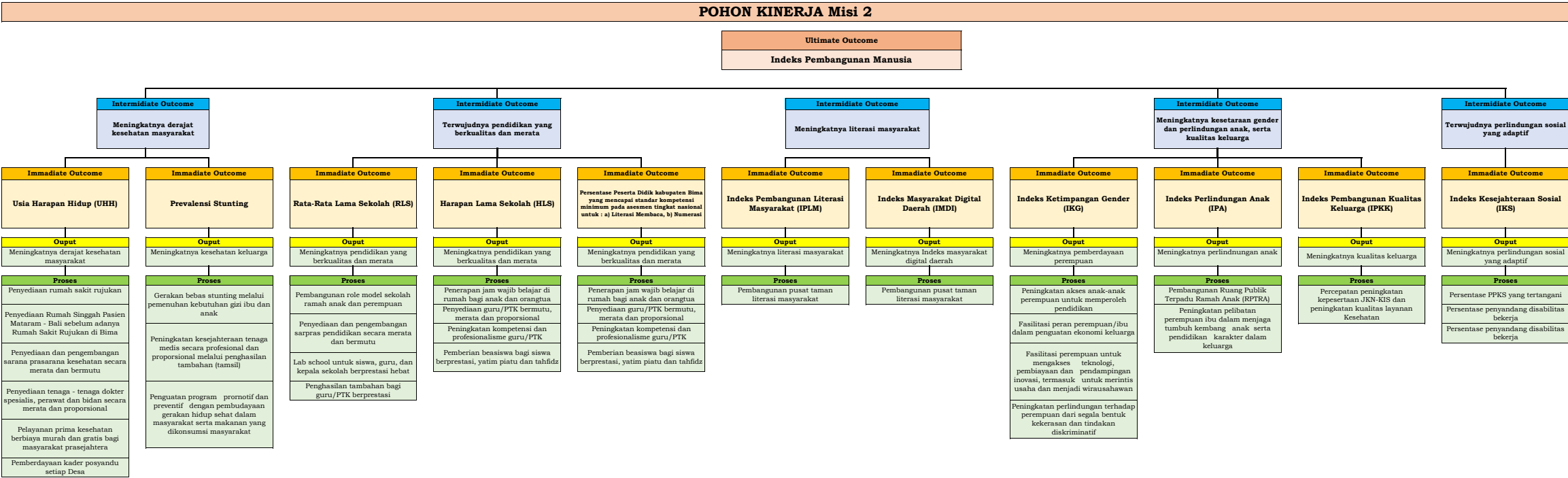




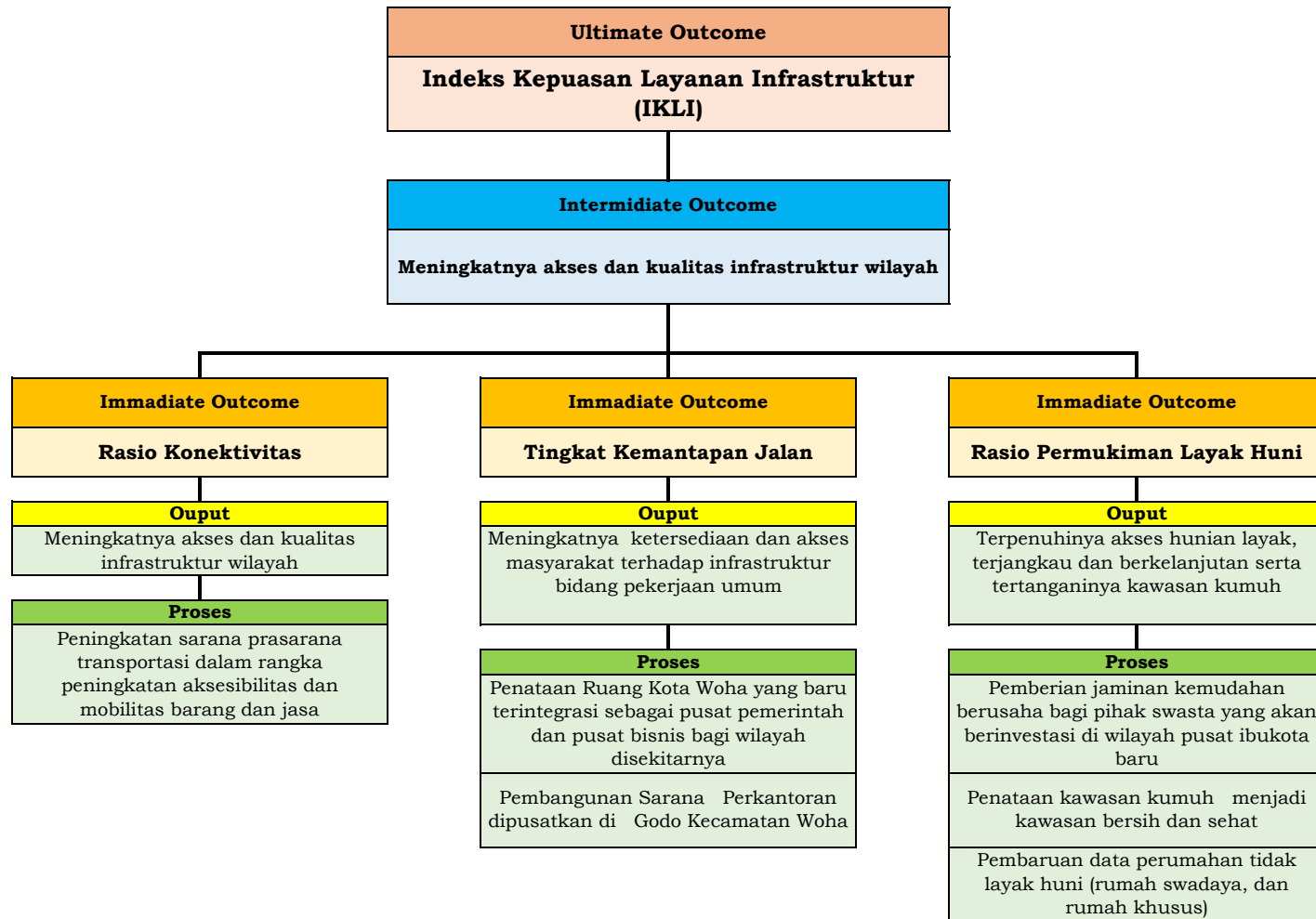


LAMPIRAN IV : POHON KINERJA

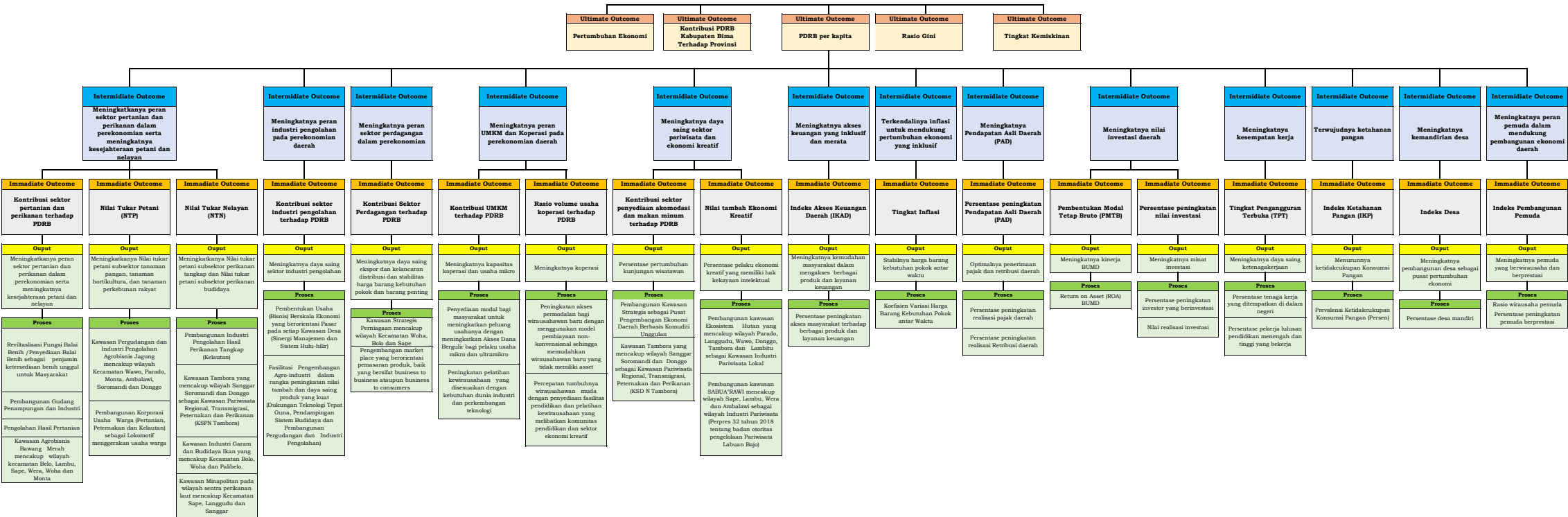




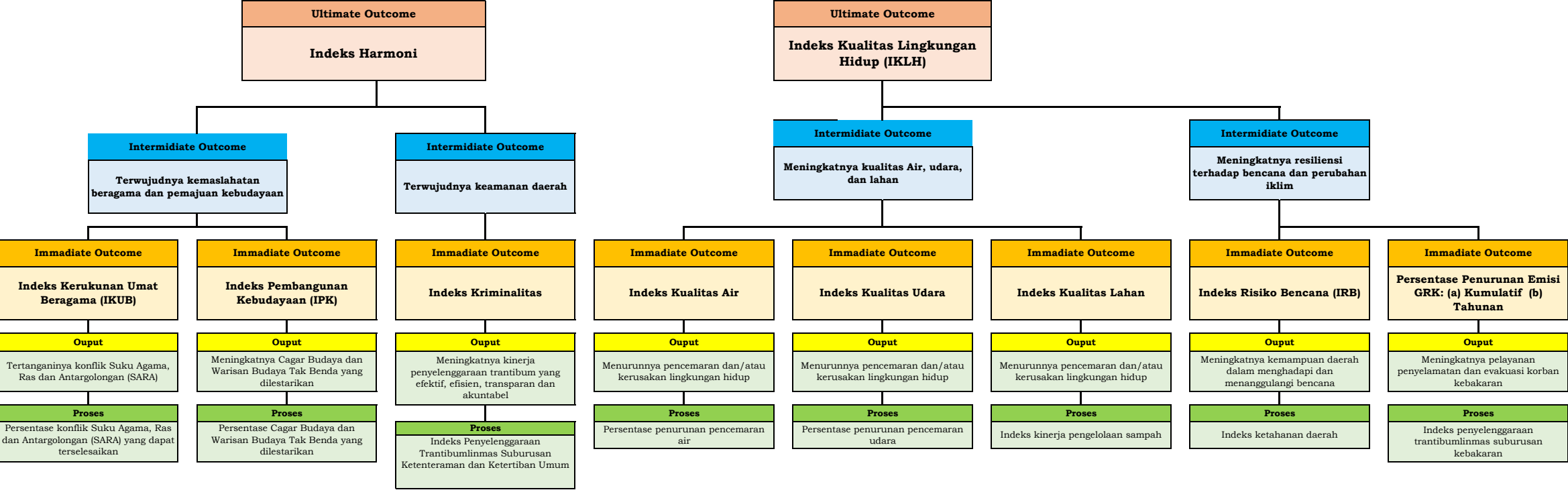
POHON KINERJA Misi 3



POHON KINERJA Misi 4	
----------------------	--



POHON KINERJA Misi 5



LAMPIRAN V : INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
VISI 1 BIMA BERMARTABAT YANG BERKEMAJUAN, MAKMUR, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN					
Misi 1 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berorientasi Hasil					
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, serta berdaya saing untuk mencapai pelayanan publik prima		Indeks Reformasi Birokrasi	Nalai Hasil Evaluasi RB oleh KemenPAN-RB	Setda
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai / Predikat hasil evaluasi AKIP pada tahun (n) oleh Tim KemenPAN-RB	Setda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).	BPKAD
		Meningkatnya profesionalitas dan integritas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (IP-ASN)	Total jumlah hasil perkalian antara bobot masing-masing dari 4 dimensi (kualifikasi, kompetensi, kinerja, disiplin) dengan skor yang diperoleh	BKD
		Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Skor hasil survei pelayanan publik. Indeks ini menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik	Setda
Misi 2 : Membangun Sumber Daya Manusia Bima yang Berkemajuan, Tangguh dan Berdaya Saing					
2.	Meningkatnya kualitas sumber		Indeks Pembangunan Manusia	$IPM= 3\sqrt{I \text{ kesehatan} \times I \text{ pendidikan}}$	Bappeda

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
	daya manusia			$\times I \text{ pengeluaran} \times 100\%$ Ket. Indeks Kesehatan Indeks Pendidikan Indeks Pengeluaran	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dikes
			Prevalensi Stunting	Banyaknya balita Stunting -----x100% Jumlah balita	Dikes
		Terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Jumlah seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas -----x100% Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Dikpora
			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Jumlah Seluruh tahun pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas -----x100% Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas	Dikpora
			Persentase Peserta Didik kabupaten Bima		

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
			yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:		
			a) Literasi Membaca	Nilai rata-rata kemampuan literasi Berdasarkan Asesmen Nasional/TKA	Dikpora
			b) Numerasi	Nilai rata-rata kemampuan Numerasi Berdasarkan Asesmen Nasional/TKA	Dikpora
		Meningkatnya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$\text{IPLM} = \frac{\sum \text{UPLM}}{\text{Total Aspek Masyarakat}} \times 100$	Perpustakaan dan Arsipi
			Indeks Masyarakat Digital Daerah (IMDI)	Rata-rata tertimbang dari empat pilar utama: Infrastruktur dan Ekosistem, Literasi Digital (keterampilan digital), Pemberdayaan, dan Pekerjaan	Diskominfo
		Meningkatnya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kualitas keluarga	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Perbandingan capaian antara IPM perempuan dan IPM laki-laki	DP3AP2KB
			Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Cakupan klaster hak anak (pendidikan, kesehatan, sipil, lingkungan keluarga) dan perlindungan khusus dari kekerasan/diskriminasi.	DP3AP2KB
			Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	$\text{Indeks} = \frac{\text{Skor Aktual} - \text{Skor Minimal}}{\text{Skor Maksimal} - \text{Skor Minimal}} \times 100$	DP3AP2KB
		Terwujudnya perlindungan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	$\text{IKS} = \frac{\sum \text{Skor}}{\text{Total Skor}} \times 100$	Dinas Sosial

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
		yang adaptif		Σ Bobot	
Misi 3 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan, energi, air melalui penegakan tata ruang yang berkelanjutan					
3.	Meningkatnya Infrastruktur yang merata dan berkeadilan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	$\frac{\sum \text{Rata - rata nilai unsur IKL}}{\sum \text{Bobot nilai per-unsur}} \times 100$	DPUPR
		Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur wilayah	Rasio Konektivitas	Rasio Konektivitas = $\sum (\text{IK} \times \text{Bobot})$	Dishub
			Tingkat Kemantapan Jalan	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruh kabupaten}} \times 100\%$	DPUPR
			Rasio Permukiman Layak Huni	$\frac{\text{Luas Pemukiman Layak Huni}}{\text{Luas Perkotaan/Total pemukiman}} \times 100$	Disperkim
Misi 4 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Ekosistem Industri Komoditas Unggulan					
4.	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi inklusif		Pertumbuhan Ekonomi	$R(t-1) = \frac{PDBt - PDBt-1}{PDBt-1} \times 100\%$ Ket. R = tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan presentase (%) PDBt = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun t PDBT-1 = Produk Domestik Bruto (pendapatan nasional riil) pada tahun	Setda
			Kontribusi PDRB Kabupaten Bima Terhadap Provinsi	$\frac{\text{PDRB Kab. Bima}}{\text{PDRB Provinsi}} \times 100$	Setda
			PDRB per kapita	$\text{PDRB} / \text{jumlah penduduk} \times 100$	Setda
			Rasio Gini	$GR = 1 - \frac{Y_i + Y_{i-1}}{Y_i + Y_{i-1}}$	Setda

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
			Tingkat Kemiskinan	persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK)	Bappeda
		Meningkatkanya peran sektor pertanian dan perikanan dalam perekonomian serta meningkatnya kesejahteraan petani dan nelayan	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian -----x100% Jumlah PDRB	Setda
			Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks harga yang diterima petani NTP = ----- X 100 Indeks harga yang dibayar Petani	Dipertambun
			Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Indeks harga yang diterima nelayan NTP = ----- X 100 Indeks harga yang dibayar nelayan	Disklut
		Meningkatnya peran industri pengolahan pada perekonomian daerah	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor Industri pengolahan -----x100% Jumlah PDRB	Setda, Disperindag
		Meningkatnya peran sektor perdagangan dalam perekonomian	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan -----x100% Jumlah PDRB	Setda, Diskopukm
		Meningkatnya peran UMKM dan Koperasi pada perekonomian daerah	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor UMKM -----x100% Jumlah PDRB	Setda, Diskopukm
			Rasio volume usaha koperasi terhadap	Total Volume Usaha Koperasi ----- x 100	Setda, Diskopukm

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
			PDRB	PDRB (ADHB)	
		Meningkatnya daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor akomodasi dan makan minum -----x100% Jumlah PDRB	Setda
			Nilai tambah Ekonomi Kreatif	Nilai tambah = Nilai Output (Produksi) – Biaya Input Antara (Biaya Produksi)	Dispar
		Meningkatnya akses keuangan yang inklusif dan merata	Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)	Jumlah perangkat daerah menerapkan pelayanan informasi publik -----x100% jumlah total Perangkat Daerah	BPKAD
		Terkendalinya inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Tingkat Inflasi	Laju Inflasi = [(IHK sekarang - IHK sebelumnya) / IHK sekarang] x 100%	Setda
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Membandingkan selisih realisasi PAD tahun berjalan dengan tahun sebelumnya terhadap realisasi tahun sebelumnya, dikalikan 100%.	Bappeda
		Meningkatnya nilai investasi daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	PMTB = Perolehan aset tetap- Pelepasan aset tetap	BPKAD
			Persentase peningkatan nilai investasi	Nilai Akhir-Nilai Awal ----- x 100 % Nilai Awal	DPMPSTP
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja -----x100% Jumlah penduduk angkatan kerja	Disnakertrans

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
		Terwujudnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor IKP = (Bobot Ketersediaan Skor Dimensi) + (Bobot Akses Skor Akses) + (Bobot Pemanfaatan Skor Pemanfaatan)	DKP
		Meningkatnya kemandirian desa	Indeks Desa	ID = Layanan Dasar + Layanan Sosial + Ekonomi + Lingkungan + Aksesibilitas + Tata Kelola	DPMD
		Meningkatnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah	Indeks Pembangunan Pemuda	Cakupan pembangunan individu, penghidupan dan kesejahteraan serta partisipasi dan kesenjangan pemuda	Dikpora
Misi 5 : Membangun Kapasitas Pemahaman Dan Pengamalan Keagamaan Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Berakhlak, Aman, Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya					
5.	Terwujudnya masyarakat yang Harmonis		Indeks Harmoni	Cakupan tngkat kerukunan, stabilitas sosial, dan kualitas kehidupan masyarakat berdasarkan empat dimensi: Ekonomi (kesetaraan), Sosial (kohesi/toleransi), Budaya (penghormatan tradisi), dan Agama (kebebasan beribadah)	Setda, Bakesbangpol
		Terwujudnya kemaslahatan beragama dan pemajuan kebudayaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Cakupan sikap dan persepsi masyarakat untuk menerima, menghormati/menghargai perbedaan agama/keyakinan	Setda, Bakesbangpol
			Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Cakupan 7 dimensi: ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan	Setda, Bakesbangpol

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
				sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender	
		Terwujudnya keamanan daerah	Indeks Kriminalitas	Cakupan 4 penilaian yaitu: (1) keamanan dari bencana, (2) pemenuhan kesejahteraan sosial, (3) perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan, dan (4) keamanan dari kekerasan (hasil survei)	Sat Pol PP
6.	Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IPA x 30% + IPU x 30% ITH x 40%	DLH
		Meningkatnya kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air	$IKA = \sum_{ni=1} \{wi \times Si\} \sum_{ni=1} wi$	DLH
			Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - 50 / 0.9 (IEU - 0.1)$	DLH
			Indeks Kualitas Lahan	$IKL = 100 - \{(84.3) - LTL / LW - DKK \times 100\} \times 5054.3$	DLH
		Meningkatnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Ancaman x Kerentanan IRB = ----- Kapasitas	BPBD
			Persentase Penurunan Emisi GRK:		
			(a) Kumulatif	Total Penurunan Emisi % Penurunan Emisi = ----- x 100 % Total Emisi Baseline	DLH
			(b) Tahunan	Emisi BAU – Emisi Aktual % Penurunan Emisi = ----- x	DLH

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Penanggung Jawab
				100 % Emisi BAU	